

Fransiskus Jasnaida Gelang, Yolinda Yanti Sonbay, Antonius Yohanes William Timuneno
**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA MATA AIR
KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG**

Yuliana C. M. Pardosi, Adi Martono
**PENGARUH STRUKTUR AKTIVA DAN LIKUIDITAS TERHADAP STRUKTUR
MODAL DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL
MODERATING PADA PERUSAHAAN CONSUMER NON CYCLICAL TAHUN
2018-2022**

Selfiana Pello
**PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENINGKATAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA KUPANG**

Ovi Yuvita Taneo, Sarlin Paleina Nawa Pau, Maria Prudensiana Leda Muga
**PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA
KECAMATAN KOTA SOE**

Yuliana Benedikta Dau
**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN SEBAGAI
PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
S.K. LERIK KOTA KUPANG**

Ana Yowester Maak, Anthon S. Y. Kerih, Sarlin Paleina Nawa Pau
**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN
MENENGAH SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS PADA UMKM UD. SANGGADOLU,
KOTA SOE)**

Jurnal Akuntansi

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Diterbitkan oleh :

Universitas Nusa Cendana

Volume 11, No. 2, Oktober 2023

Hal. 87 - 142

ISSN : 2338-4468

E-ISSN : 2715-1158

Jurnal Akuntansi

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

PELINDUNG / PENASEHAT

Dekan FEB UNDANA

Dr. Apriana H. J. Fanggaldae.,SE.,M.Si

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Program Studi Akuntansi

Yohana Febiani Angi, SE., MAKS

PEMIMPIN REDAKSI

Sarinah Joyce M. Rafael, SE.,M.Acc.,Ak.,CA

EDITOR

Sarlin Nawa Pau, SE., M.Si., CFrA.

Adhitya Agri Putra, SE., M.Acc., Ak., CA

Angga P. Karpriana, SE., M.Acc., Ak.,CA

Meliza Putrianti Zifi, SE., M.Acc.

Maria Elerina Douk Tunti, SE., M.Si.

Moni W. Muskanan, SE., MPA, CFrA.

Maria P. L. Muga, SE., M.Si., Ak.

I Komang Arthana, SE., M.Si., CFrA

Filipus Argentano G. Suryaputra,SE.,M.Ak

REVIEWER

Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE,
M.Com. (Hons), CSRS, Ph.D

(Universitas Brawijaya);

Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com
(Hons),Ph.D., Ak. (Universitas Negeri
Solo);

Prof. Intiyas Utami, M.Si., CA., CMA.,
QIA (Universitas Kristern Satya
Wacana)

Yuliansyah, SE., MSA., Ph.D., Akt., CA
(Universitas Lampung);

Dr. Anthon Simon Yohanis Kerih, SE,
MSi. (Universitas Nusa Cendana);

Halim Dedy Perdana, SE., MSM.,
M.Rech., Ak., CFrA (KAP DBSD)

Nuur Widiastono, SE., MSE., Ak., CFE.,
CA., ACPA (IAI Wilayah NTT)

ALAMAT REDAKSI

Jl. Adisucipto Penfui Kupang-NTT

Telp. (0380) 881183

Fax. (0380) 881183

Email: jak.feb@undana.ac.id

Terbit 2x: MARET dan OKTOBER

Jurnal Akuntansi:

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

DAFTAR ISI

- 87 – 90*
- **PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA MATA AIR KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG**
Fransiskus Jasnaida Gelang
Yolinda Yanti Sonbay
Antonius Yohanes William Timuneno
- 90 – 101*
- **PENGARUH STRUKTUR AKTIVA DAN LIKUIDITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN CONSUMER NON CYCLICAL TAHUN 2018-2022**
Yuliana C M Pardosi
Adi Martono
- 102 – 112*
- **PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG**
Selfiana Pello
- 113 - 120*
- **PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA KECAMATAN KOTA SOE**
Ovi Yuvita Taneo
Sarlin Paleina Nawa Pau
Maria Prudensiana Leda Muga
- 121 - 132*
- **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH S.K. LERIK KOTA KUPANG**
Yuliana Benedikta Dau
- 133 - 142*
- **PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS PADA UMKM UD. SANGGADOLU, KOTA SOE)**
Ana Yowester Maak
Anthon S. Y. Kerih
Sarlin Paleina Nawa Pau

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA MATA AIR KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG

Fransiskus Jasnaida Gelang

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
nansy12jasnaida@gmail.com

Yolinda Yanti Sonbay

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
yolinda81@gmail.com

Antonius Yohanes William Timuneno

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
antoniustimuneno@unwira.ac.id

ABSTRAK

Era pemerintahan sekarang desa memainkan peranan yang penting dimana desa menjadi garda terdepan untuk mengidentifikasi setiap persoalan yang ada dalam masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk bisa mengetahui persoalan dalam masyarakat adalah dengan membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar aspirasi masyarakat bisa dicatat pada RAPBDes untuk membuat APBDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan APBDes, bagaimana peran dari BPD dalam penyusunan APBDes, apakah peranan BPD dalam penyusunan APBDes di Desa Mata Air telah berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses Penyusunan APBDes Di Desa Mata Air terdiri dari beberapa tahap, diawali dengan kepala desa membentuk tim sampai pada kepala desa menetapkan RAPBDes tersebut menjadi Perdes APBDes dan menyampaikan ke Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi APBDes. Peranan BPD dalam penyusunan APBDes yakni menjangir aspirasi masyarakat melalui rapat dan keputusan yang diambil BPD mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kerja sama antara BPD dan instansi terkait cukup baik, sehingga program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyusunan APBDes di desa Mata Air sudah berjalan dengan efektif karena BPD telah menjalankan tugas sesuai dengan porsi atau fungsi mereka dimana mereka melakukan dengan beberapa produk yang mereka hasilkan termasuk peraturan desa serta pengawasan menyangkut pelaksanaan APBDes.

Kata kunci : *APBDes, BPD.*

ABSTRACT

In the current government era, the village plays an important role where the village is at the forefront of identifying any problems that exist in society. One way for the government to find out about problems in the community is to form a Village Consultative Body (BPD) so that people's aspirations can be recorded in the RAPBDes to make the APBDes. This study aims to find out how the process of preparing the APBDes is, what is the role of the BPD in preparing the APBDes, whether the role of the BPD in preparing the APBDes in Mata Air Village has been effective. This study uses qualitative methods and the types of data in this study are primary data and secondary data. The results of this study indicate that the process of preparing the APBDes in Mata Air Village consists of several stages, starting with the village head forming a team until the village head determines the RAPBDes to become Perdes APBDes and submits it to the Regent through the Camat to be ratified as APBDes. The role of the BPD in preparing the APBDes is to capture community aspirations through meetings and decisions taken by the BPD reflect the needs of the community and the cooperation between the BPD and related agencies is quite good,

so that the programs implemented are in accordance with the needs of the community. The preparation of the APBDes in Mata Air village has been running effectively because the BPD has carried out their duties in accordance with their portion or function where they carry out the various products they produce including village regulations and supervision regarding the implementation of the APBDes.

Keywords : APBDes, BPD

PENDAHULUAN

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Desa memainkan peranan yang sangat penting karena desa menjadi garda terdepan yang dapat mengetahui secara baik permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat hingga sampai pada perencanaan dan realisasi dari program-program yang merupakan tanggung jawab negara. Saat ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Perencanaan pembangunan desa adalah suatu hal yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Aspirasi masyarakat merupakan substansi penting dalam perencanaan pembangunan desa, maka dari itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya BPD yang akan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam membuat Rancangan Peraturan Desa yang akan ditetapkan menjadi dalam suatu Peraturan Desa, dalam melaksanakan pembangunan desa dibutuhkan anggaran yang cukup banyak untuk mewujudkan pembangunan yang merata di masyarakat. Anggaran yang dimaksud adalah APBDes, rancangan APBDesa dibuat berdasarkan RAPBDesa dan rencana kerja pemerintah desa. Alokasi pengeluaran dalam APBDes meliputi belanja pembangunan dan pos pengeluaran rutin. Belanja pembangunan meliputi pos sarana pemerintahan desa, pos

prasarana perhubungan, pos prasarana pemasaran, pos prasarana sosial. Sedangkan untuk belanja rutin meliputi pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos biaya pemeliharaan, pos biaya perjalanan dinas, pos belanja lain-lain, pos pengeluaran tak terduga sebagaimana diatur oleh kelembagaan desa.

KAJIAN TEORI

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD. Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemen-nya desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD

berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia, penggunaan nama istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan ini sebagai permusyawaratan di desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan pembangunan desa berdasarkan Pancasila.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. penyusunan rancangan APBDesa dibuat berdasarkan RAPBDesa dan rencana kerja pemerintah desa yang nantinya akan diteruskan kepada kepala desa. Kemudian rancangan APBDesa tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan APBDesa tersebut disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama nantinya rancangan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Jika rancangan APBDesa tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepala desa dapat menetapkan

rancangan APBDesa tersebut menjadi peraturan desa. Namun jika rancangan APBDesa tersebut dianggap tidak sesuai dan masih kurang layak, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi struktur, observasi dan dokumentasi, informan dalam penelitian ini meliputi anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *Data Reduction*, *Data Display* dan *Conclusion Drawing/Verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses Penyusunan APBDes Di Desa Mata Air terdiri dari beberapa tahap, diawali dengan kepala desa membentuk tim untuk melakukan musyawarah penyusunan APBDes berdasarkan RAPBDes hingga menjadi rancangan APBDes. Setelah RAPBDes disepakati oleh BPD dan kepala desa menetapkan RAPBDes tersebut menjadi Perdes APBDes selanjutnya kepala desa menyampaikan ke Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi APBDes, maka pemerintah desa dan BPD menyebarluaskan Perdes APBDes kepada masyarakat. Peranan BPD dalam penyusunan APBDes yakni menjaring aspirasi masyarakat melalui rapat dan keputusan yang diambil oleh BPD mencerminkan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dan kerja sama antara BPD dan instansi terkait cukup baik, sehingga program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar. Penyusunan APBDes di desa Mata Air sudah berjalan dengan efektif karena BPD telah menjalankan tugas sesuai dengan porsi atau fungsi mereka

dimana mereka melakukan dengan beberapa produk yang mereka hasilkan termasuk peraturan desa serta pengawasan menyangkut pelaksanaan APBDes.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan BPD dalam Penyusunan APBDes di Desa Mata Air dapat disimpulkan bahwa: Proses Penyusunan APBDes Di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang terdiri dari beberapa tahap agar menciptakan APBDes yang transparan dan akuntabel. BPD memiliki peran penting dalam penyusunan APBDes Di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, tugas pokok BPD adalah dengan menjangkau aspirasi masyarakat dilakukan dengan menampung keluhan-keluhan atau masalah yang ada dalam masyarakat dan peranan BPD dalam penyusunan APBDes di desa Mata Air sudah berjalan dengan efektif karena BPD telah menjalankan tugas sesuai dengan porsi atau fungsi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, F. (2021). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Bidang Pembangunan Tahun 2019 (*Studi Kasus: Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima*). Diss. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Jagad, H. P. (2014). Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumasari. *Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Kurniawan, I., & Kurniawan, R. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBDes dan Dampaknya terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Mamesah, F. Y. (2014). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)

1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1054.

- Momongan, L. (2014). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Sugiono, (2019). Metode Penelitian Administrasi dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wiguna, Y. T. (2019). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Study kusus desa Bandar Klippa). *Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan*.

PENGARUH STRUKTUR AKTIVA DAN LIKUIDITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN CONSUMER NON CYCLICAL TAHUN 2018-2022

Yuliana C M Pardosi

Universitas Pamulang

yuliy6867@gmail.com

Adi Martono

Universitas Pamulang

dosen01599@unpam.ac.id

ABSTRAK

Dampak dari pandemi Covid 19 menyebabkan perusahaan harus menjual aktiva sebagai alternatif sumber pendanaan untuk memperbaiki struktur permodalannya dan meningkatkan kinerja Perusahaan. Hal ini menarik untuk diteliti karena fenomena yang terjadi adalah beberapa perusahaan melakukan strategi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perubahan struktur aktiva, likuiditas terhadap struktur modal Perusahaan, yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional akan berpengaruh positif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, bersumber dari data sekunder yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sektor industri *consumer non-cyclical* periode tahun 2018-2022. Perusahaan yang masuk dalam sektor ini adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual produk kebutuhan masyarakat. Adapun teknik pengolahan data adalah regresi linier berganda dengan faktor pemoderasi. Hasil penelitian ini adalah struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap struktur permodalan perusahaan, sedangkan likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur permodalan. Pengaruh struktur aktiva terhadap struktur permodalan dimoderasi negatif oleh kepemilikan institusional namun tidak demikian dengan pengaruh likuiditas terhadap struktur permodalan tidak dimoderasi oleh kepemilikan institusional.

Kata Kunci: *Struktur Aktiva, Likuiditas, Kepemilikan Institusional, Struktur Modal*

ABSTRACT

The impact of the Covid 19 pandemic has forced companies to sell their assets as an alternative funding source to improve their capital structure and company performance. This is interesting to study because the phenomenon that occurs is that several companies carry out this strategy. This study aims to see whether changes in asset structure and liquidity to the company's capital structure, which are moderated by institutional ownership will have a positive effect. This study uses a quantitative method, sourced from secondary data, namely companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the non-cyclical consumer industry sector for the 2018-2022 period. Companies included in this sector are companies that produce and sell products needed by the community. The data processing technique is multiple linear regression with a moderating factor. The results of this study are that the asset structure has no effect on the company's capital structure, while liquidity has a negative effect on the capital structure. The influence of asset structure on the capital structure is moderated negatively by institutional ownership, however, the effect of liquidity on the capital structure is not moderated by institutional ownership.

Keywords: *Asset Structure, Liquidity, Institutional Ownership, Capital Structure*

PENDAHULUAN

Dampak dari pandemic Covid-19 tidak hanya pada kesehatan, social-ekonomi dan pendidikan masyarakat namun juga pada kondisi perekonomian nasional. Beberapa perusahaan terpaksa harus menghentikan operasional bisnisnya, beberapa Perusahaan lainnya berusaha bertahan hidup namun dengan kondisi yang tidak mudah. Perusahaan perlu mempertimbangkan keberlanjutan bisnisnya dengan salah satunya adalah memanfaatkan dana yang bersumber dari baik dari internal maupun eksternal perusahaan (Khayati et al., 2022). Dampak pandemi Covid 19 tersebut masih berlanjut hingga saat ini dan muncul fenomena yaitu beberapa Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjual asetnya. Dikutip dari CNBC Indonesia, PT Utama Karya, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Waskita Karya (Persero) Tbk. melepas asetnya yang berbentuk property sebagai alternatif mendapatkan pendanaan dan menaikkan kinerja Perusahaan (Yanwardhana, 2022). Demikian halnya dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Eagle High Plantation Tbk yang berkode (BWPT), melepas 5 (lima) anak perusahaan anak untuk menyehatkan kondisi likuiditas dan neraca perusahaan (Timorria, 2023).

Terkait dengan fenomena tersebut, obyek pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan di sektor *consumer non-cyclical*, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta memberikan laporan keuangan selama periode tahun 2018-2022. Perusahaan di sektor ini merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual produk kebutuhan masyarakat sehari-hari dan relatif tidak terpengaruh dengan gejolak ekonomi (Khenndy & Njotoprajitno, 2023). Pertimbangan utama dalam memilih sektor ini adalah karena keberadaan perusahaan di sektor ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional bila dibandingkan dengan perusahaan jasa dan perusahaan di sektor lainnya (Priatna et al., 2023). Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, ada 58 perusahaan yang masuk dalam sektor ini selama periode sebagaimana

disebutkan di atas.

Pada perusahaan-perusahaan di sektor *consumer non-cyclical*, mesin-mesin/peralatan, tanah dan bangunan merupakan aset yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan produk yang akan dijual. Biasanya, perusahaan menggunakan utang untuk memperoleh aset tersebut. Aset yang dimiliki oleh perusahaan dipakai untuk menghasilkan pendapatan dan pengukuran dilakukan untuk melihat efisiensi kerja aset tersebut (Bautista et al., 2022).

Hal lain yang menjadi perhatian adalah likuiditas, faktor penentu bagi perusahaan agar mampu membiayai operasional perusahaan seperti biaya produksi, biaya pemasaran, biaya logistik dan distribusi, biaya penelitian serta biaya teknologi informasi. Terkait dengan likuiditas, perusahaan menghadapi risiko likuiditas yang rendah bila komponen ekuitas dari struktur modal suatu perusahaan semakin besar, sebaliknya risiko likuiditas semakin tinggi bila komponen utang dari struktur modal semakin besar (Omoregie et al., 2019).

Sedangkan struktur modal merupakan sebuah skema ketika perusahaan memutuskan untuk berinvestasi, yang kemungkinan dibiayai menggunakan ekuitas atau utang atau campuran keduanya. Struktur modal menjadi topik yang paling banyak diteliti dalam bidang manajemen keuangan, terutama terkait *trade-off* antara utang-ekuitas. Hal ini adalah menentukan kinerja keuangan dan kondisi keseluruhan perusahaan (Omoregie et al., 2019)

Beberapa penelitian sebelumnya telah menganalisis berbagai faktor menyangkut keuangan dan kinerja perusahaan. Ada 2 faktor fundamental yang mempengaruhi keadaan perusahaan yaitu faktor internal, antara lain kondisi manajemen dan faktor eksternal antara lain kondisi pasar. Analisis pada penelitian ini dilakukan untuk memahami permasalahan sebagaimana yang terjadi pada fenomena yaitu bagaimana pengaruhnya Struktur Aktiva, Likuiditas terhadap Struktur Modal serta bagaimana Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh Struktur Aktiva dan Likuiditas terhadap Struktur Modal.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi (*agency theory*). Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Setiawan et al., (2021) menjelaskan bahwa *agency theory* merupakan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih pemilik (*principal*) meminta pihak lainnya manajemen (*agent*) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama *principal* yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Teori agensi memiliki dua tujuan yaitu, pertama untuk meningkatkan kemampuan individu (baik *principal* maupun *agent*) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil. Kedua, untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara *principal* dan agen sesuai dengan kontrak.

Struktur Modal

Struktur modal adalah komposisi dan sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasional dan proyek bisnisnya. Ini mencakup kombinasi dari berbagai bentuk modal, seperti ekuitas (saham), utang (pinjaman), dan instrumen keuangan lainnya (Nur Maulani et al., 2023). Struktur modal perusahaan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja, keberlanjutan, dan nilai Perusahaan (Oktavia et al., 2021).

Struktur modal perusahaan mengacu pada komposisi dari berbagai bentuk sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi jangka panjangnya, yang komponen utamanya adalah ekuitas dan utang (Rizky & Putra, 2020). Ekuitas melibatkan pemilik perusahaan dan investor yang memiliki saham dalam perusahaan, sementara utang melibatkan pinjaman dan kewajiban finansial lainnya yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

Pentingnya struktur modal dalam perusahaan tidak dapat diabaikan, karena hal ini dapat mempengaruhi aspek-aspek penting berikut: a) risiko dan Keuntungan: Struktur modal yang tepat dapat membantu mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dan kreditur (Cahyani & Nyale, 2022). b) Biaya Modal: Struktur modal yang efisien dapat mengurangi biaya modal perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitasnya. c) Kebijakan Dividen: Struktur modal mempengaruhi kebijakan pembagian dividen, yang merupakan bagian dari laba yang diberikan kepada pemegang saham (Mamnuaah & Pratiwi, 2021). d) Nilai Perusahaan: Struktur modal yang tepat dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga membuatnya lebih menarik bagi investor potensial (Arjuniadi & Khairunnisa, 2021). e) Fleksibilitas Keuangan: Struktur modal yang baik dapat memberikan fleksibilitas keuangan kepada perusahaan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga atau perubahan pasar.

Struktur modal perusahaan memiliki peran penting dalam menentukan kesehatan keuangan dan nilai perusahaan. Memiliki struktur modal yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan dan operasionalnya dengan lebih baik. Namun, tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua perusahaan, karena setiap perusahaan harus mempertimbangkan kondisi pasar, risiko keuangan, pertumbuhan masa depan, dan preferensi pemegang saham dalam menentukan struktur modal yang ideal (Purnama & Purnama, 2020). Penting bagi manajemen perusahaan untuk melakukan analisis dan perencanaan yang cermat dalam menentukan struktur modal yang sesuai bagi perusahaan mereka. Struktur modal diprosikan sebagai *debt to equity ratio* (DER).

Struktur Aktiva

Struktur aktiva perusahaan adalah representasi komposisi dan klasifikasi dari aset yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu (Priatna et al., 2023). Aktiva perusahaan mencakup semua sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memiliki nilai

ekonomi dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Struktur aset juga didefinisikan sebagai rasio antara kepemilikan aset tetap dan total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Meilani & Wahyudin, 2021).

Struktur aktiva perusahaan merupakan aset-aset perusahaan dalam klasifikasi yang tertentu, sehingga memudahkan untuk dianalisis dan dipantau kinerja bisnisnya. Aset-aset ini dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, likuiditas, periode kepemilikan, dan tujuan penggunaannya .

Arne dalam penelitiannya (Arindhita & Sutrisno, 2022) menyebutkan jenis-jenis Aktiva : a) Aktiva Lancar (Current Assets): Merupakan aset yang diperkirakan akan diubah menjadi uang tunai atau habis dalam satu siklus operasional perusahaan, biasanya dalam waktu satu tahun. Contohnya antara lain kas, piutang dagang, persediaan barang, dan investasi jangka pendek. b) Aktiva Tetap (*Fixed Assets*): merupakan aset yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasional jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Aktiva tetap meliputi tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan mesin-mesin Produksi (Santoso & Willim, 2022). c) Investasi (*Investments*): merupakan aset yang dimiliki perusahaan untuk jangka waktu tertentu, baik berupa *fix asset* atau *financial asset* seperti saham di perusahaan lain atau obligasi (Santoso et al., 2020). d) Aktiva Tidak Berwujud (*Intangible Assets*): Merupakan aset non-fisik yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi dan biasanya digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill (Santoso et al., 2020).

Memahami struktur aktiva perusahaan merupakan langkah kritis dalam analisis keuangan. Beberapa alasan mengapa struktur aktiva penting dalam analisis keuangan antara lain a) Evaluasi Kesehatan Keuangan: Struktur aktiva dapat memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan dan tingkat likuiditasnya. Jumlah dan komposisi aset lancar menentukan sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek (Priatna et al., 2023). b) Pengelolaan Risiko: Struktur aktiva yang tepat

dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar dan kondisi ekonomi. Struktur aktiva merupakan faktor penting dalam penilaian risiko kredit perusahaan oleh bank. Struktur aset perusahaan mencerminkan likuiditas, kemampuan laba, dan solvabilitasnya (Lin & He, 2019). c) Perencanaan Investasi: Mengetahui komposisi aktiva perusahaan membantu manajemen dalam merencanakan investasi jangka panjang dan menentukan kebijakan pengelolaan aset yang efisien (Santoso et al., 2020). d) Penilaian Nilai Perusahaan: Struktur aktiva yang baik juga mempengaruhi penilaian nilai perusahaan (Fatima et al., 2023). Aset yang berlimpah dan bernilai tinggi dapat meningkatkan valuasi perusahaan dalam pasar (Santoso & Willim, 2022). Struktur Aktiva diprosikan sebagai Rasio Aktiva Tetap = $\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aktiva}}$

Likuiditas

Likuiditas adalah salah satu konsep utama dalam analisis keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu (Arindhita & Sutrisno, 2022). Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai pengertian likuiditas, pentingnya likuiditas dalam manajemen keuangan perusahaan, serta metode yang digunakan untuk mengukur likuiditas.

Likuiditas mencerminkan sejauh mana perusahaan memiliki aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat untuk memenuhi kewajiban finansial yang jatuh tempo (Eka Pratama & Rosyada Fitriati, 2023). Aset likuid adalah aset yang dapat dijual atau diperdagangkan dengan mudah tanpa menimbulkan penurunan nilai yang signifikan. Sebagai contoh, kas dan setara kas, seperti deposito berjangka, biasanya dianggap sebagai aset likuid karena mudah diakses dan dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat.

Likuiditas memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa likuiditas penting: a) Memenuhi

Kewajiban Finansial: Perusahaan yang likuid memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban finansialnya tepat waktu, seperti pembayaran utang dagang, pembayaran gaji, dan pinjaman yang jatuh tempo (Nur Maulani et al., 2023). b) Manajemen Risiko Keuangan: Likuiditas yang mencukupi membantu perusahaan mengatasi risiko keuangan yang mungkin timbul dari perubahan kondisi pasar atau situasi bisnis yang tak terduga (Omoregie et al., 2019). c) Kesempatan Investasi: Perusahaan dengan likuiditas yang baik dapat dengan mudah mengambil peluang investasi yang menguntungkan tanpa harus mengandalkan utang atau pendanaan eksternal (Arindhita & Sutrisno, 2022). D) Kredibilitas di Pasar: Likuiditas yang baik dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pemasok, kreditur, dan investor, yang dapat mempengaruhi rating kredit dan akses terhadap sumber dana. E) Kelangsungan Operasional: Likuiditas yang cukup penting untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan dan mencegah kemungkinan kebangkrutan.

Ada beberapa rasio dan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan, antara lain adalah Rasio Lancar (Current Ratio): Rasio ini menghitung perbandingan antara aktiva lancar (aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat) dengan kewajiban lancar (kewajiban yang jatuh tempo dalam satu tahun). Current ratio dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi rasio ini, semakin likuid perusahaan (Setiaputra & Viriany, 2021). Rasio ini yang dipakai pada penelitian ini.

Likuiditas adalah konsep penting dalam menganalisis keuangan sebuah perusahaan karena menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan cepat dan tepat waktu (Anderson & Lie Sha, 2021). Likuiditas penting dalam manajemen risiko keuangan, penilaian kredibilitas, dan kelangsungan operasional perusahaan. Dalam penelitian ini, untuk mengukur likuiditas diprosikan sebagai Rasio Lancar = $\text{Aset Lancar} / \text{Hutang lancar}$.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah istilah yang merujuk pada kepemilikan saham atau aset lainnya dalam suatu perusahaan oleh institusi keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dana investasi, dana lindung nilai (*hedge fund*), bank, dan lembaga keuangan lainnya. Para pemilik institusional ini mengelola dana milik masyarakat atau klien untuk tujuan investasi dan seringkali memiliki jumlah saham yang cukup besar dalam berbagai perusahaan (Dewi & Sudirgo, 2021).

Kepemilikan institusional terjadi ketika lembaga keuangan atau entitas lain yang mengelola dana atas nama klien atau nasabahnya membeli saham atau aset lainnya dari perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal. Kepemilikan institusional memiliki dampak yang signifikan dalam pasar modal dan ekonomi secara keseluruhan: a) Pengaruh pada Harga Saham: Kepemilikan institusional yang besar dapat mempengaruhi harga saham suatu perusahaan. Sesuai dengan hukum *supply and demand*, ketika institusi besar membeli atau menjual saham dalam jumlah besar, hal ini akan menyebabkan pergerakan harga yang signifikan. b) Pengaruh pada Pengambilan Keputusan Perusahaan: Pemilik institusional yang memiliki proporsi saham yang besar dalam perusahaan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Para manajemen perusahaan mungkin cenderung mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan dari pemegang saham institusional besar (Ayem & Tarang, 2022). c) Pengaruh pada Praktik Tata Kelola Perusahaan: Pemegang saham institusional sering kali memiliki kepentingan dalam tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Kehadiran pemegang saham institusional yang aktif dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel (Mardanny & Suhartono, 2022). d) Likuiditas Pasar Saham: Kepemilikan institusional dapat meningkatkan likuiditas pasar saham karena institusi cenderung terlibat dalam perdagangan aktif dan dalam nilai yang besar (Yasmin, 2021). Hal ini dapat mempermudah transaksi bagi investor lain yang ingin membeli atau menjual saham.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham atau aset lainnya dalam suatu perusahaan oleh lembaga keuangan atau entitas yang mengelola dana atas nama klien atau nasabahnya. Dalam penelitian ini, kepemilikan Institusional diproksikan dengan kepemilikan institusional = Jumlah saham institusional/jumlah saham beredar.

METODE PENELITIAN

Metode Kuantitatif merupakan metode penelitian yang didasari oleh filsafat positivisme, untuk mempelajari suatu populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data memakai peralatan penelitian dan menganalisis data yang sifatnya kuantitatif untuk menguji hipotesis awal (Sugiyono, 2022). Creswell mendefinisikan bahwa penelitian kuantitatif merupakan suatu pendekatan untuk menguji teori-teori obyektif dengan memeriksa hubungannya antara variabel. Variabel-variabel tersebut, diukur sehingga sejumlah data dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik (Creswell & Creswell, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel menggunakan data sekunder yaitu struktur aktiva dan likuiditas sebagai variabel bebas, kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dan struktur modal sebagai variabel terikat.

Teknik pengumpulan data sekunder dengan *purposive sampling* mengacu pada pengumpulan data dari sumber data yaitu data Perusahaan di sektor consumer *non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2022. Pendekatan *purposive sampling* untuk memilih data yang relevan dan sesuai dengan kriteria penelitian yang ditetapkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi Model Data Panel

Hasil pengujian dengan menggunakan

Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas Breusch-pagan yakni sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dipilih adalah REM (*Random Effect Model*).

Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif menjelaskan terkait beberapa hal yaitu mean, median, nilai maksimum dan nilai minimum serta simpangan standar. Hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	DER (Y)	SA (X1)	CR (X2)	KI (Z)
Mean	0,955	0,390	2,367	0,658
Median	0,735	0,347	1,626	0,731
Maximum	2,464	0,832	8,799	0,920
Minimum	0,108	0,000	0,152	0,057
Std.Dev	0,724	0,195	1,854	0,220

Sumber : data sekunder Eviews

Hasil statistik deskriptif untuk variabel Struktur Modal (Y), memiliki nilai mean sebesar 0,955 sedangkan median sebesar 0,735. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,108 dimiliki oleh PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk pada tahun 2022, artinya rata-rata komposisi utang dan modal perusahaan adalah sebesar 95,5%, modal perusahaan lebih besar dari utangnya. Nilai maksimum sebesar 2,464 dimiliki oleh PT. Tunas Baru Lampung Tbk pada tahun 2022, artinya jumlah utang Perusahaan 2,464 x lebih besar dari modal perusahaan. Standar deviasi untuk struktur modal adalah sebesar 0,724.

Hasil statistik deskriptif untuk variabel Struktur Aktiva (X1), memiliki nilai mean 0,390 atau rata-rata Perusahaan memiliki rasio struktur aktiva sebesar 39%. Artinya rata-rata perusahaan memiliki aktiva tetap sebesar 39% total aktiva yang dimiliki perusahaan. Sedangkan median sebesar 0,347. Nilai minimum sebesar 0,000 dimiliki oleh PT. Mayora Indah Tbk tahun 2022, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,832 dimiliki oleh

PT. Tri Banyan Tirta Tbk tahun 2018. Standar deviasi variabel Struktur Aktiva adalah sebesar 0,195.

Hasil statistik deskriptif untuk variabel Likuiditas (X2) memiliki nilai mean 2,367; artinya dari perusahaan yang diteliti rata-rata memiliki jumlah harta lancar sebesar 2,267 x dari jumlah utang lancarnya, sedangkan median sebesar 1,626. Nilai minimum sebesar 0,152 dimiliki oleh PT. Fks Food Sejahtera Tbk pada tahun 2018, artinya harta lancar perusahaan sangat kecil. Sedangkan nilai maksimum sebesar 8,799 dimiliki oleh PT. Bisi International Tbk pada tahun 2022, artinya harta lancar Perusahaan 8,799 x lebih besar dari utang lancar perusahaan. Standar deviasi variabel Likuiditas adalah sebesar 1,854.

Hasil statistik deskriptif untuk variabel Kepemilikan Institusional (Z) memiliki nilai mean 0,658; artinya dari perusahaan yang diteliti rata-rata sebanyak 65,8% saham perusahaan dimiliki oleh institusional. Median sebesar 0,731. Nilai minimum sebesar 0,057 dimiliki oleh PT. Fks Food Sejahtera Tbk di tahun 2022, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,920 dimiliki oleh PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk pada tahun 2022. Standar deviasi variabel Kepemilikan Institusional adalah sebesar 0,220.

Uji Asumsi Kasik
Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas dengan *Jarque-bera* diketahui bahwa probabilitas ($0,4451 > 0,050$), artinya data pada penelitian ini berdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan ke pengujian berikutnya.

Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali untuk pengujian multikolinearitas, dapat dilakukan dengan melihat koefisien korelasi setiap variabel bebas, dengan kriteria yaitu bila nilai koefisien setiap variabel bebas $< 0,8$ maka tidak terjadi multikolinearitas (Meiryani, 2021b). Nilai korelasi untuk variabel Struktur Aktiva (X1) terhadap variable Likuiditas (X2) sebesar -0,636; nilai korelasi variabel Struktur Aktiva

(X1) terhadap variable Kepemilikan Institusional (Z) sebesar -0,437 dan nilai korelasi Likuiditas (X2) terhadap variable Kepemilikan Institusional (Z) sebesar 0,253; oleh karena itu dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diatas dengan menggunakan uji *Glejser* nilai probabilitas dari variabel struktur Aktiva sebesar 0,253; variabel Likuiditas sebesar 0,067 dan variabel Kepemilikan Institusional sebesar 0,806; semua lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan uji *Durbin Watson* dapat diperoleh nilai DW sebesar 1,410. Dari data tersebut, bahwa angka DW berada di antara -2 sampai dengan +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam variabel penelitian ini tidak terjadi autokorelasi (Meiryani, 2021a).

Moderated Regression Analysis

Tabel 2. Hasil Moderated Regression Analysis

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
probabilitas	-0,007	0,327	-0,024	0,980
(0,4451 > 0,050)	0,660	0,801	0,824	0,413
X2 ini	-0,224	0,142	-1,574	0,121
X1; Z	-0,130	0,893	-0,146	0,047
X2; Z	-0,038	0,213	-0,177	0,859

Uji Hipotesis

Terkait uji hipotesis, ada 3 metode yang digunakan yaitu koefisien determinasi, Uji t dan Uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi atau nilai Adjusted R-Squared adalah sebesar 0,323 yang diartikan bahwa 32,3% variabel dapat dijelaskan oleh variabel bebas, sedangkan sisanya ($100 - 32,3\% = 67,7\%$) dijelaskan oleh sebab – sebab yang lain diluar model atau

dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} , serta F_{hitung} dan F_{Tabel} terkait hipotesis pada penelitian ini, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil Pengujian Terhadap Hipotesis

	α	Hasil
H1	0,314	Tidak berpengaruh
H2	0,000	Berpengaruh
H3	0,000	Berpengaruh
H4	0,047	Memoderasi
H5	0,859	Tidak memoderasi

Struktur Aktiva tidak berpengaruh secara parsial dan tidak signifikan terhadap Struktur Modal

Struktur Aktiva tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Struktur Modal yang dapat diasumsikan bahwa Perusahaan menggunakan modal perusahaan untuk memenuhi kebutuhan investasinya tanpa menggunakan utang dan hal ini sejalan dengan pecking order theory (Purnama & Purnama, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Mamnuah sejalan dengan hipotesis ini bahwa Struktur Aktiva tidak mempengaruhi secara signifikan oleh Struktur Modala (Mamnuah & Pratiwi, 2021).

Likuiditas secara parsial berpengaruh negatif terhadap Struktur Modal

Likuiditas secara parsial berpengaruh negatif terhadap Struktur Modal, ini sejalan dengan hasil penelitian (Hertina et al., 2022). Salah satu sumber likuiditas adalah dari pendanaan dari eksternal perusahaan dalam bentuk utang yang akan mempengaruhi Struktur Modal perusahaan. Semakin besar likuiditas yang bersumber dari utang maka akan menaikkan rasio struktur modal, yang pada suatu keadaan tertentu akan menurunkan kinerja perusahaan.

Struktur Aktiva perusahaan dan Likuiditas secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap Struktur

Modal.

Struktur Aktiva perusahaan dan Likuiditas secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap Struktur Modal. Hal ini sejalan dengan teori *Trade-off*, bahwa jumlah utang akan mencapai kondisi yang optimal jika manfaat yang diperoleh dari pendanaan utang tersebut lebih besar dengan biaya dana yang dikeluarkan akibat utang tersebut. Biaya dana dari utang dan ekuitas yang rendah akan menghasilkan tambahan arus kas tambahan (*free cash flow*) (Nizam et al., 2023).

Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal secara negatif.

Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal secara negatif. Dengan kata lain, Kepemilikan Institusional dapat menekan/mengontrol perusahaan dalam menggunakan sumber dana dari eksternal yang bersifat utang dengan jumlah yang tinggi.

Kepemilikan Institusional tidak memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal

Kepemilikan Institusional tidak memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal. Hal ini dikarenakan intitusi yang juga sebagai pemilik perusahaan melakukan pengawasan untuk mencapai likuiditas perusahaan yang tinggi dengan menggunakan utang yang tinggi karena dianggap mampu membayar utang dengan likuiditas yang diperoleh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis perusahaan dan variabel terikat Struktur Modal untuk 11 perusahaan di sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya satu variabel yang memberi pengaruh yaitu negatif terhadap Struktur Modal yaitu Likuiditas.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal yang berbeda dengan konsep yang seharusnya :

- 1) Secara teori, merujuk pada *trade-off theory*, untuk meleverage keuangan perusahaan, perusahaan perlu mengandalkan sumber pendanaan dari luar dan tidak hanya bersumber pada ekuitas saja. Siklus bisnis atau perekonomian menentukan pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal. Pada saat perekonomian booming, likuiditas perusahaan akan meningkat bersamaan dengan peningkatan profil utang dan sebaliknya selama penurunan ekonomi (Omoregie et al., 2019). Likuiditas perusahaan dan rasio utang memiliki hubungan. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi memiliki risiko likuiditas yang lebih rendah dan berpeluang untuk mengambil lebih banyak utang (Nizam et al., 2023).
- 2) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memoderasi pengaruh likuiditas terhadap struktur modal. Secara konseptual, dari sudut pandang teori keagenan, pemegang saham institusional dapat meningkatkan nilai atau kinerja perusahaan. Pemegang saham institusional dapat memantau perusahaan lebih efisien dan memiliki insentif keuangan karena kepemilikan saham di perusahaan tersebut (Sakawa & Watanabel, 2020). Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan adalah likuiditas dan struktur modal.

Saran

Penelitian ini berfokus pada sektor *consumer non-cyclical* di Indonesia, mengingat setiap sektor mempunyai tantangan

keuangan yang berbeda, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut pada sektor lain. Berdasarkan hasil, kesimpulan, dan keterbatasan penelitian, disarankan agar penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain di luar variabel bebas yang telah diteliti untuk mengetahui faktor lain (Trafalgar & Africa, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, E., & Lie Sha, T. (2021). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 949–957. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/JPA.V3I3.14875>
- Arindhita, A. A., & Sutrisno. (2022). The Effect of Profitability, Asset Structure, Business Risk, and Liquidity on Capital Structure in Health Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Economics, Business and Management Research*. <https://doi.org/https://doi.org/10.51505/ijebmr.2022.6614>
- Arjuniadi, A., & Khairunnisa, K. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Modal, Kesempatan Investasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Garmen dan Tekstil Yang Terdaftardi. *Jurnal Ekobismen*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47647/je ko.v1i2.499>
- Ayem, S., & Tarang, T. M. D. (2022). Pengaruh Risiko Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Strategi Bisnis Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 17(2), 91. <https://doi.org/https://doi.org/10.21460/jr ak.2021.172.400>
- Bautista, J. J. M., Luna, A. B. M., Cornejo, G. H. N., Zapata, N. A. S., & Quispe, J. A. D. (2022). An Analysis of Profitability, Capital Structure, and Credit Risk in the Peruvian Microfinance Sector. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33094/ijaefa.v13i1.608>

- Cahyani, N., & Nyale, M. H. Y. (2022). Pengaruh Struktur Aset dan Likuiditas terhadap Struktur Modal dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(7), 2675–2686. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v5i7.748>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Dewi, I. M., & Sudirgo, T. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 966–974. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/JPA.V3I3.14878>
- Eka Pratama, A., & Rosyada Fitriati, I. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Struktur Aset Terhadap Struktur Modal Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(2), 2040–2052. <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/MSEJ.V4I3.1616>
- Fatima, N., Shaik, A., & Tripathy, S. (2023). Firm Value and Profitability of Saudi Arabian Companies Listed on Tadawul: Moderating Role of Capital Structure. *International Journal of Sustainable Development and Planning*. <https://doi.org/https://doi.org/10.18280/ijdp.180522>
- Hertina, D., Huda, A., Santi, L., Herdiawan, H., & Mohamad, B. (2022). Capital Structure Impact of Assets Structure, Net Profit Margin and Current Ratio. *Central Asia & the Caucasus (14046091)*, 23(1), 4363–4369. [https://web.s.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&auth_type=crawler&jrnl=14046091&AN=158215629&h=MBRsg%2F2jR6APGWk%2FVQQRFAViiXsgO8CDGFvOtTBNc4nD5lbb0dn2WSePWihR2lskDjjs1V7442%2BdYld1T1R%2Bg%3D%3D&crl=c](https://web.s.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&auth_type=crawler&jrnl=14046091&AN=158215629&h=MBRsg%2F2jR6APGWk%2FVQQRFAViiXsgO8CDGFvOtTBNc4nD5lbb0dn2WSePWihR2lskDjjs1V7442%2BdYld1T1R%2Bg%3D%3D&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3Fdirect%3Dtrue%26profile%3Dehost%26scope%3Dsite%26auth_type%3Dcrawler%26jrnl%3D14046091%26AN%3D158215629)
- Khayati, A., Sari, R. D. P., & Giovanni, A. (2022). Nilai Tambah Modal Manusia dan Keberlangsungan Bisnis Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals. *Borobudur Management Review*, 2(2), 169–189. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/bmar.v2i2.7377>
- Khenndy, K., & Njotoprajitno, R. S. (2023). Kondisi Ekonomi dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 5145–5152. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/JIIP.V6I7.1820>
- Lin, Q., & He, J. (2019). Supply chain contract design considering the supplier's asset structure and capital constraints. *Computers & Industrial Engineering*, 137, 106044. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106044>
- Mamnua, M., & Pratiwi, A. P. (2021). Pengaruh Struktur Aktiva, Pertumbuhan Aset dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 285–301. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SAKUNTALA/article/view/13562>
- Mardanny, A., & Suhartono, S. (2022). Kemampuan Keputusan Pendanaan dan Keputusan Investasi Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 23–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.46806/ja.v1i1.853>
- Meilani, U., & Wahyudin, A. (2021). Pengaruh Struktur Aset, Risiko Bisnis, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal*

- Akuntansi* *Bisnis*
<https://doi.org/https://doi.org/10.24167/JAB.V19I1.3513>
- Meiryani, M. (2021a). *Memahami Uji Autokorelasi Dalam Model Regresi*. <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-autokorelasi-dalam-model-regresi/>
- Meiryani, M. (2021b). *Memahami Uji Multikolinearitas Dalam Model Regresi*. *Binus University, School of Accounting*. <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-multikolinearitas-dalam-model-regresi/>
- Nizam, B., Safai, N., & Asari, F. (2023). Determinants of Capital Structure: An Analysis of Listed Firms in Malaysia. *International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB)*, 8(48), 72–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.55573/IJAFB.084807>
- Nur Maulani, S., Yudhawati, D., & Suharti, T. (2023). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 3(2362–367). <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/JEBS.V3I2.908>
- Oktavia, K., Gunarianto, G., & P.P., H. (2021). Pengaruh Struktur Aktiva Dan Likuiditas Terhadap Struktur Modal Perusahaan Industri Barang Konsumsi BEI 2016-2019. *Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB)*, 2(1), 465–474. [https://doi.org/WidyagamaNationalConferenceonEconomicsandBusiness\(WNCEB\),2\(1\),465-474](https://doi.org/WidyagamaNationalConferenceonEconomicsandBusiness(WNCEB),2(1),465-474). <https://doi.org/10.31328/WNCEB.V2I1.3181>
- Omoregie, O. K., Olofin, S. A., & Ikpesu, F. (2019). Capital Structure and The Profitability-Liquidity Trade-Off. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(3), 105–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.32479/ijefi.7758>
- Priatna, H., Anggraini, I., & Ananda, I. (2023). Effect of Asset Structure and Capital Structure on Profitability. *Journal of Accounting INABA (JAI)*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.56956/JAI.V2I01.195>
- Purnama, M., & Purnama, O. (2020). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Aset Terhadap Struktur Modal. *Eco-Buss*, 2(3), 18–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.32877/e.b.v2i3.137>
- Rizky, M. Z., & Putra, R. (2020). Determinan Faktor Struktur Modal pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013-2018. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i2.18582>
- Sakawa, H., & Watanabel, N. (2020). Institutional Ownership and Firm Performance under Stakeholder-Oriented Corporate Governance. *Sustainability 2020, Vol. 12, Page 1021*, 12(3), 1021. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/SU12031021>
- Santoso, H., Lako, A., & Rustam, M. (2020). Relationship of Asset Structure, Capital Structure, Asset Productivity, Operating Activities and Their Impact on the Value of Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(8), 358–370. <https://doi.org/https://doi.org/10.18415/IJMMU.V7I8.1909>
- Santoso, H., & Willim, A. P. (2022). The Influence of Asset Structure and Capital Structure on Firm Value With Asset Productivity and Operating Activities as Mediating Variables. *International Journal Papier Public Review*, 3(1), 40–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.47667/IJPPR.V3I1.140>
- Setiaputra, N., & Viriany, D. (2021). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Tangibility, dan Likuiditas Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Paradigma*

- Akuntansi*, 3(3), 984–992.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24912/JPA.V3I3.14880>
- Setiawan, I. K., Sunarsih, N. M., & Munidewi, I. . B. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi) 1 (1)*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Manajemen* (Setiyawami (ed.); 2nd ed.). Alfabeta.
- Timorria, I. F. (2023, June 18). *Bos Eagle High (BWPT) Ungkap Alasan Jual 5 Aset Perusahaan*. *Bisnis.com*
- Trafalgar, J., & Africa, L. A. (2019). The Effect of Capital Structure, institutional Ownership, Managerial Ownership, and Profitability on Company Value in Manufacturing Companies. *The Indonesian Accounting Review*, 9(1), 27–38.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14414/ti ar.v9i1.1619>
- Yanwardhana, E. (2022, January 25). Lagi Ramai Perusahaan Konstruksi Negara Jual Aset Properti. *CNBC Indonesia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220125150306-4-310302/lagi-ramai-perusahaan-konstruksi-negara-jual-aset-properti>
- Yasmin, A. (2021). Foreign Ownership Effect to Stock Market Liquidity in Indonesia. *MANAJERIAL*, 8(1), 1.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v8i01.1940>

PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG

Selfiana Pello

Universitas Nusa Cendana
selfianapello07005@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Pemeriksaan Pajak sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai variabel dependen. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah diolah oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak yang baik dapat dicapai jika jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa pajak tinggi. Karena tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menerangkan bahwa tindakan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

Kata kunci: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Self Assessment System, dan Surat Pemberitahuan (SPT).

ABSTRACT

This research analyzes the effect of implementing tax audits on increasing corporate taxpayer compliance at the Kupang Pratama Tax Service Office. The analysis used in this research is simple linear regression analysis. Tax Audit as the independent variable and Corporate Taxpayer Compliance as the dependent variable. The data source for this research is secondary data, namely data that has been processed by the Kupang Pratama Tax Service Office. The research results show that tax audits have a significant effect on corporate taxpayer compliance. This means that good taxpayer compliance can be achieved if the number of tax audits carried out by the tax inspector is high. Because the purpose of the audit is to test taxpayer compliance. This explains that tax audit actions can increase corporate taxpayer compliance at the Kupang Pratama Tax Service Office.

Keywords : Tax Audit, Corporate Taxpayer Compliance, Self Assessment System, and Tax Return (SPT).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat balas jasa. (Putra, 2019:7). Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan sehingga diharapkan penerimaan pajak terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik.

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984, dengan memberlakukan undang-undang NO 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* khususnya terhadap pemungutan PPh Badan (Wahyono dkk, 2018). Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan mendaftarkan diri ke kantor pajak, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak ke bank persepsi/kantor pos, melaporkan penyetoran kepada Direktorat Jenderal Pajak, menetapkan sendiri jumlah pajak melalui pengisian SPT dengan baik dan benar. Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada Wajib Pajak juga harus diimbangi dengan pengawasan yang besar pula agar tidak disalahgunakan oleh Wajib Pajak guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, sehingga pendapatan pajak negara dapat meningkat juga. Karena itu agar pendapatan pajak meningkat wajib pajak harus patuh akan kewajibannya. pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada Wajib Pajak juga harus diimbangi dengan pengawasan yang besar pula agar tidak disalahgunakan oleh Wajib Pajak guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan (Tampubolon, 2018).

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan

Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak (Juliantari dkk, 2021).

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(Trisnayanti & Jati, 2015) Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam tunggakan. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utama dalam melaksanakan pembangunan (Kurniawan, 2018).

Namun demikian, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan Wajib Pajak umumnya masih rendah tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang itu sendiri menghendaki bahwa dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan mendorong Wajib Pajak agar lebih mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pengaruh selanjutnya akan meningkatkan sumber penerimaan Negara yang berasal dari pajak (Tampubolon, 2018).

Begitu juga hal yang terjadi di KPP Pratama Kupang yang pada dasarnya telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun data yang diperoleh menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang

tidak melaporkan surat pemberitahuan Tahun 2017-2019.

Tabel 1
Data SPT wajib pajak badan di KPP
Pratama Kupang

Tahun	Jumlah wajib pajak badan terdaftar	SPT tahun laporan	SPT tahunan tidak laporan	Persentase tidak laporan
2017	10.523	3.385	7.138	67%
2018	11.314	3.699	7.615	67%
2019	12.189	3.468	8.721	71%

Sumber: KPP Pratama Kupang

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat pengolahan data bahwa dari Wajib Pajak Badan yang terdaftar tidak sepenuhnya dapat direkam karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT tahunannya. Persentase tidak laporan juga menunjukkan kenaikan selama tiga tahun terakhir. Faktor yang mempengaruhinya adalah karena kepatuhan wajib Pajak Badan yang masih kurang dalam melaporkan dan membayar sendiri pajaknya sesuai dengan prinsip *self assessment system*.

Tabel 2
Target dan realisasi pajak tahun 2017-
2019

Tahun	Target penerimaan (Rp)	Realisasi penerimaan (Rp)	Pencapaian (%)
2017	1.326.280.790.000	1.097.904.597.965	82,78
2018	1.373.559.760.000	1.146.668.494.419	83,48
2019	1.422.364.331.000	1.241.909.642.916	87,31

Sumber: KPP Pratama Kupang

Berdasarkan Tabel 2 hal yang dapat dilihat adalah dari penerimaan pajak tahun 2017-2019 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang yang tidak dapat merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini berarti masih banyak Wajib Pajak badan yang

belum membayar pajaknya. Sehingga dapat diartikan kepatuhan Wajib Pajak badan ini masih rendah jika dibandingkan dengan banyaknya Wajib Pajak Badan di Kantor pajak ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis berminat untuk mengambil judul “Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang”.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi ini dapat dikaitkan dengan pemeriksaan pajak, dimana pemerintah/negara sebagai *principal* yang mempunyai hak untuk menarik pajak pada warga negara, demi kepentingan pembangunan nasional. Agen yang dimaksud dalam hal ini yaitu Pemeriksa pajak yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan agar tujuan pemerintah/negara dapat tercapai yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak.

Pajak

Pajak merupakan pungutan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat balas jasa (Putra, 2019:7).

Jenis Pajak

Jenis pajak dalam (Resmi, 2018:7) menjelaskan terdapat 3 golongan jenis pajak yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungut Pajak. Menurut golongan terdiri dari pajak langsung dan Pajak tidak langsung, menurut sifatnya pajak terbagi menjadi Pajak subjektif dan Pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungut pajak terdiri dari Pajak negara dan Pajak daerah.

Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut (Mardiasmo, 2013) dibagi menjadi beberapa yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

Sistem Perpajakan

Sistem pemungutan pajak menurut (Resmi, 2018:11) dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding system*.

Istilah Perpajakan

Berikut ini beberapa istilah atau pengertian umum dalam membicarakan perpajakan sesuai pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 dalam (Resmi, 2018:18-19) yang terdiri dari wajib pajak, badan, pengusaha, pengusaha kena pajak, nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan.

Pemeriksaan Pajak

Menurut (Resmi, 2018:18) sesuai Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut (Suandy, 2011:204) adalah Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut (Waluyo, 2014:380) yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

Standar Pemeriksaan Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 / PMK.03 / 2007 pasal 6 ayat 1-3 tentang tata

cara pemeriksaan pajak yaitu standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaanya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak sebagai kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017) Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam (Yuliansyah dkk, 2019), kepatuhan pajak dapat diartikan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis kepatuhan wajib pajak menurut (N. Rahayu, 2017) ada dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak menurut (S. Rahayu & Lingga, 2009) yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Wajib Pajak Badan

Pengertian wajib pajak menurut (Resmi, 2018:18) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data berasal dari KPP Pratama Kupang.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang pada periode 2019-2021. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Kupang, didapat jumlah populasi sebanyak 39.321 Wajib Pajak Badan.

Metode yang digunakan peneliti dalam pemilihan sampel penelitian adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan jumlah populasi tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Kupang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang diambil secara bulanan sehingga terdapat 36 sampel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumen.

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam menganalisis data penelitian digunakan *software SPSS (Statistical Program for Social Science)* versi 26. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis regresi dalam mengolah data penelitian dengan jumlah sampel sebanyak 36. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Data pemeriksaan pajak diperoleh dari akumulasi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dan data kepatuhan Wajib Pajak Badan diperoleh dari jumlah pelaporan SPT badan 46 dibagi dengan jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar dikalikan 100%, sehingga menghasilkan data tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Secara umum tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan mengalami penurunan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak badan berada

diantara 11,49%-79,46%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan dimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berada pada tingkat 10,92%-73,59%. Kembali mengalami penurunan, dimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada tahun 2021 berada diantara 9,52%-62,91%.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang pada tahun 2019 sebanyak 8-66 kali per bulan. Kemudian di tahun 2020 terjadi peningkatan dimana dilakukan pemeriksaan pajak sebanyak 9-69 kali per bulan. Kemudian terjadi penurunan sebanyak 9-58 kali di tahun 2021 pemeriksaan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Untuk menginterpretasikan hasil statistik deskriptif dari pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Analisis statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Mini mum	Maxi mum	Mea n	Std. Devi ation
Pemeriksaan Pajak	36	8.00	69.00	23.3056	17.88826
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	36	9.52	76.46	25.1156	19.59849
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data diolah, (Hasil output IBM SPSS versi 26)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa n atau jumlah pada setiap variabel adalah 36 yang berasal dari jumlah pemeriksaan pajak dan SPT Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang periode Januari 2019 – Desember 2021. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai maksimum sebesar 69,00 dan nilai minimum sebesar 8,00, nilai standar deviasi lebih kecil dari *mean*-nya, hal tersebut

menunjukkan rendahnya variasi antara nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan, dengan kata lain tidak terdapat kesenjangan yang cukup besar dari pemeriksaan pajak terendah dan tertinggi.

Variabel kepatuhan wajib pajak Badan yang ditunjukkan oleh jumlah SPT Badan lapor memiliki nilai maksimum sebesar 76,46 dan nilai minimum sebesar 9,52, standar deviasi lebih kecil dari *mean*-nya menunjukkan rendahnya variasi antara nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan, atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari kepatuhan wajib pajak badan terendah dan tertinggi.

Uji Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan model regresi yang tidak bias dan yang terbaik, maka harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi klasik. Berkaitan dengan uji asumsi klasik dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan akan menghasilkan estimator yang tidak bias, apabila memenuhi beberapa asumsi klasik, beberapa asumsi yang dipakai dalam penelitian ini yang akan diuji adalah sebagai berikut:

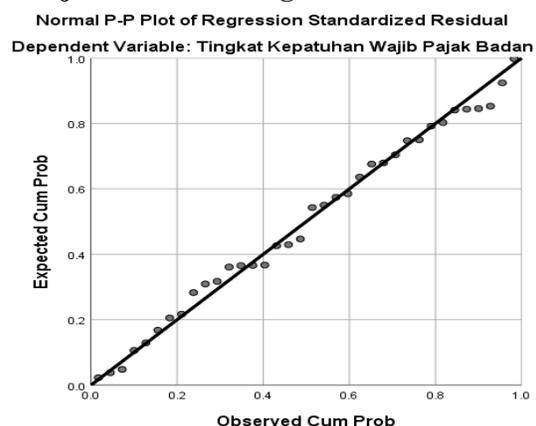
Uji normalitas digunakan untuk mendeteksi apakah distribusi dan variabel bebas dan variabel terikatnya adalah normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Cara melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov, dimana jika Signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika Signifikansi (Asymp.sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Selain itu, untuk menguji normalitas ini dapat pula diketahui dari tampilan *normal probability plot*. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4
Uji Normalitas KS-Z

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.72845301
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.058
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Jika Signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika Signifikansi (Asymp.sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel *one sample Kolmogorov-smirnov test* diatas diperoleh nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 0,200. Karena nilai signifikansi 0,05 lebih kecil atau kurang dari 0,200 maka bisa dikatakan bahwa distribusi data adalah normal.

Gambar 1
Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot



Pada grafik *normal probability* diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Jika distribusi data

residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Berdasarkan grafik di atas disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan VIF. Jika semakin kecil nilai *Tolerance* dan semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinearitas. Dalam kebanyakan penelitian menyebutkan bahwa jika *Tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 5.

Tabel 5
Uji multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemeriksaan Pajak	1.000	1.000

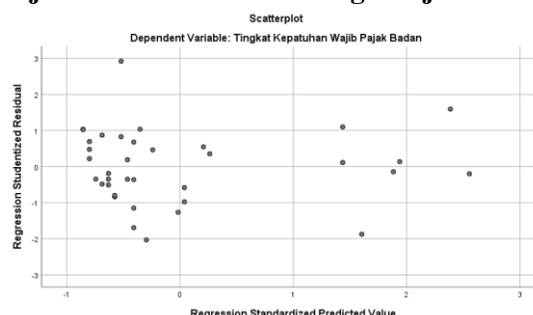
a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dari tabel *Coefficients* dapat diketahui bahwa nilai Tolerance dari variabel independen lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas sementara itu untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui *scatter plot* (diagram pancar) dan metode Glejser, dari variabel bebas terhadap variabel terikat terpenuhi jika diantara nilai residual dan nilai prediksinya tidak

membentuk pola tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Scatter Plot



Metode pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas dengan melihat *Scatter Plot* yaitu jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (*Regression Standardized Residual*) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Dari Gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Dalam pengujian heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode Glejser. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.073	.639		4.805	.000
	Pemeriksaan Pajak	-.007	.022	-.057	-.331	.743

a. Dependent Variable: ABRESID

Uji Glejser digunakan agar bisa mengetahui apakah pola variabel gangguan mengandung heteroskedastisitas atau tidak. Jika nilai signifikansi (sig.) lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Berdasarkan tabel diatas, dari hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser diperoleh nilai signifikansi 0,743 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data pada variabel-variabel penelitian. Masalah autokorelasi sering terjadi pada data waktu. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.982 ^a	.964	.963	3.78289	1.539
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak					
b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan					

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 1,539. Angka tersebut berada di antara -2 sampai 2 yang berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi, sehingga layak untuk dilakukan pengujian regresi. Selain itu, dengan cara membandingkan nilai Durbin-Watson dari hasil regresi dengan nilai Durbin-Watson tabel. Dengan taraf signifikansi 0,05 dan menentukan nilai dL dan dU dL = 1,4107 dan dU = 1,5245. Dimana, n=36 dan k=1.

Syarat tidak terjadi autokorelasi yaitu Nilai DW > dU dan DW < 4 - dU. Jadi, dapat dihitung nilai DW=1,539 > dU=1,5245 dan 4 - dU = 2,4755.

Persamaan Regresi Linear Sederhana

Dengan menggunakan data hasil penelitian, seperti yang digunakan pada uraian deskripsi variabel, maka digunakan metode regresi sederhana yang diolah menggunakan program SPSS. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Badan. Hasil pengolahan diperoleh nilai sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.048	1.045		.046	.964
Pemeriksaan Pajak	1.076	.036	.982	30.090	.000
a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan					

Berdasarkan hasil koefisien regresi pada Tabel 8, dengan menggunakan program SPSS versi 26 maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,048 + 1,076X + e$$

- a. Konstanta sebesar 0,048 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang adalah sebesar 0,048. Atau jika tidak ada Pemeriksaan Pajak (X) maka nilai kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) adalah sebesar 0,048.
- b. Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak sebesar 1,076 menyatakan bahwa setiap terjadi pemeriksaan pajak sebanyak 1 (satu) kali akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang sebesar 1,076. Atau dengan kata lain setiap penambahan 1 tingkat pemeriksaan pajak (X)

maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) akan meningkat sebesar 1,076.

Pengujian Hipotesis

- a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)
Untuk membuktikan apakah variabel pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka digunakan uji t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan *thitung* dengan *ttabel* dan nilai $t\text{-sig} > \alpha = 0,05$. Apabila $thitung > ttabel$ atau $t\text{-sig} < \alpha = 0,05$, maka H_a diterima. Sebaliknya, apabila $thitung < ttabel$ atau $t\text{-sig} > \alpha = 0,05$, maka H_a ditolak. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9
Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.048	1.045		.046	.964
Pemeriksaan Pajak	1.076	.036	.982	30.090	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Untuk membandingkan antara *thitung* dengan *ttabel*, maka kita harus mencari terlebih dahulu hasil dari *ttabel*. Untuk mencari hasil dari *ttabel*, diperlukan rumus untuk mencari nilai dari *ttabel*, yaitu:

$$ttabel = (\alpha : 2; n-k-1)$$

dimana:

α = tingkat kepercayaan

n = jumlah data

k = jumlah variabel bebas

Sehingga diperoleh *ttabel* = (0,05 : 2; 36-1-1) kemudian didapat dari *ttabel* hasil akhir berupa 2,03224.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai *thitung* untuk pemeriksaan pajak sebesar 30,090 > dari *ttabel* sebesar 2,03224 dan nilai signifikansi (Sig.) 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang artinya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

- b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel kepatuhan wajib pajak badan. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Nilai R^2 yang mendekati satu variabel independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel kepatuhan wajib pajak badan. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam Tabel 10.

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.982 ^a	.964	.963	3.78289

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak
b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dari *output model summary*, diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,964 (penguadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu $0,982 \times 0,982 = 0,964$). Besarnya angka koefisien determinasi R^2 adalah 0,964 sama dengan 96,4%. Angka tersebut mengandung arti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 96,4%. Sedangkan sisanya 3,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian pada penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa pemeriksaan pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang ada. Dapat dilihat pada hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai *t*hitung untuk pemeriksaan pajak sebesar 30,090 > dari *t*tabel sebesar 2,03224 dan nilai signifikansi (Sig.) 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang artinya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan pengujian regresi dimana pemeriksaan pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 96,4% atau 0,964. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah sebesar 96,4%, sedangkan sisanya yaitu 3,6% merupakan pengaruh dalam variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang ada bahwa terdapat pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak yang baik dapat dicapai jika jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa pajak tinggi. Karena tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Dengan dilakukannya pemeriksaan, maka akan mampu mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak badan untuk melaporkan dan menghitung dengan benar segala kewajibannya. Semakin tinggi jumlah pemeriksaan pajak, maka kepatuhan wajib pajaknya semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori keagenan (*Agency theory*) jika dikaitkan dengan pemeriksaan pajak, dimana pemerintah/negara sebagai *principal* yang mempunyai hak untuk menarik pajak pada warga negara, demi kepentingan pembangunan nasional. *Agent* yang dimaksud dalam hal ini yaitu Pemeriksa pajak yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan

pemeriksaan agar tujuan pemerintah/negara dapat tercapai yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak.

Kepatuhan pajak akan tercipta dengan melakukan interaksi yang rutin antara pihak pemungut pajak dengan pihak wajib pajak. Dengan adanya interaksi yang dibangun secara rutin, hal tersebut akan memupuk kesadaran wajib pajak tentang pentingnya melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Timbulnya kesadaran akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Belia Natasya Putri dan Ira Septriana pada tahun 2020 dengan judul Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pemeriksaan pajak, kesadaran, dan kualitas pelayanan pajak pada KPP Pratama Semarang Barat yang dikemukakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya yang dilakukan peneliti untuk mengetahui Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Maka, kesimpulan penelitian ini adalah H_a diterima yang berarti pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan setiap bulan dan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan peneliti, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang diharapkan untuk meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam upaya untuk mendorong kesadaran wajib pajak agar patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang berbeda dari penelitian ini misalnya pelayanan pajak, penagihan pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan. Sehingga dapat ditemukan faktor lain apa saja

yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Kurniawan, I. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(3), 1–11.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Anak Hebat Indonesia.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Resmi, S. (2018). *Perpajakan Teori dan Kasus* (10th ed.). Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak* (5th ed.). Salemba Empat.
- Tampubolon, Y. S. A. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 292–310.
- Wahyono, F. E., Rahmawati, S., Lubis, F., & Simanjuntak, T. H. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Kota Tangerang. *Forum Ekonomi*, 20(2), 64–73.
- Waluyo. (2014). *Akuntansi Pajak* (5th ed.). Salemba Empat.
- Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., & Mumpun, R. S. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara). *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(2), 233–253.

PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA KECAMATAN KOTA SOE

Ovi Yuvita Taneo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
siaahanopita@gmail.com

Sarlin Paleina Nawa Pau

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
sarlin.pau@staf.undana.ac.id

Maria Prudensiana Leda Muga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
maria.muga@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Kota Soe, disertai dengan kendala yang dihadapi dan juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Auditor di Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepala desa berserta jajarannya di Desa Kuatae dan Desa Noemeto Kecamatan Kota Soe. Penelitian ini difokuskan pada Peran Inspektorat dengan pokok penelitian diantaranya Peran Inspektorat Daerah, Pengawasan dan dana desa. Metode analisis yang digunakan adalah Miles dan Huberman (1984) dengan alat bantu perangkat lunak (software) NVivo. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pengawasan dana desa di kecamatan Kota Soe lebih berfokus pada pembinaan untuk meminimalisir tindakan penyelewengan terhadap dana desa. Kendala yang terjadi adalah kurangnya sumber daya manusia dan juga beberapa kendala lainnya seperti kurangnya komunikasi, untuk itu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat program kerja yang baik dan efektif dan juga melakukan pendekatan secara persuasif.

Kata kunci : Inspektorat, dana desa, audit, pengawasan

ABSTRACT

This research aims to determine the role of the South Central Timor Regency Inspectorate in supervising financial management of village funds in Soe Citysub-district. The data used in this research was obtained using interviews and field observation methods. This research uses a qualitative research approach. The informants in this research were the auditor at the Inspectorate of South Central Timor Regency, the village head and the staff in Kuatae village and Noemeto Village, Soe City sub-district. This research focuses on the role of the inspectorate with research points including the role of regional inspectorates, supervision and village funds. The analytical method used is the method developed by Miles and Huberman (1984) with the Nvivo Software tool. The result of this research state that the role of the regional inspectorate in supervising village funds in Kota Soe sub-district is more focused on training to minimize the occurrence of misappropriation of village funds.

Key words : Inspectorate, Village funds, Audit, Supervision

PENDAHULUAN

Pembangunan Desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita yang ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka NKRI” seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan terkait desa menjadi instrument regulasi dalam menerapkan Nawa Cita menjadikan pembangunan sebagai salah satu misi belia yakni pada misi keempat “Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan”. Disahkannya UU No 6 Tahun 2014, maka otonomi Daerah menjadi lebih luas dimana Desa diberi Keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri. Dengan adanya hal ini, Desa saat ini memiliki peran yang sangat besar dalam hal keberhasilan pembangunan Nasional.

Keberhasilan Pembangunan di Desa tentunya tidak terlepas dari pemerintah Desa yang melaksanakannya secara langsung. Untuk itu pada Tahun 2015, Pemerintah membuat Program Dana Desa yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana desa merupakan alokasi dana untuk membangun desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana desa juga merupakan salah satu bentuk pemasukan Desa. PP 8/2016 mengartikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Nominal yang diterima oleh pihak Desa sangat Besar. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar pembangunan di Desa dapat

terlaksana dengan baik. Dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui hasil evaluasi bersama dari setiap daerah penerima dana desa menetapkan nominal alokasi yang berbeda setiap tahun. Desa di seluruh Indonesia memperoleh dana desa sesuai dengan aturan yang ditetapkan, termasuk desa yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Tentang Peringkat Kemiskinan Di Indonesia, pada tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat ketiga dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,68%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat agar pembangunan secara merata dapat terlaksana di Indonesia. Salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana menurut Data dari Badan Pusat Statistik, (2021) pada tahun 2021, Angka kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah 27% dan ini merupakan angka kemiskinan tertinggi di Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 32 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 266 Desa. Sebagian Desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan bagian dari Penerima Dana Desa.

Tabel 1.1 Rincian Dana Desa Per Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2022

Kecamatan	Dana Desa (Rp)		
	2021	2022	2023
Kota SoE	1.913.619	2.020.904	1.711.345
Mollo Selatan	6.671.508	6.443.463	4.790.153
Mollo Utara	18.421.546	18.103.924	14.708.150
Amanuban Timur	11.115.159	10.881.574	9.056.647
Amanuban Tengah	9.705.019	9.882.190	8.492.230
Amanuban Selatan	11.905.061	11.893.872	10.317.605
Amanuban Barat	9.759.184	9.213.466	8.370.943
Amanatun Selatan	13.492.254	13.307.865	11.290.378

Kecamatan	Dana Desa (Rp)		
	2021	2022	2023
Amanatun Utara	8.763.408	8.652.273	7.728.056
KiE	14.973.567	14.253.318	12.711.418
Kuanfatu	14.560.094	14.174.358	12.296.956
Fatumnasi	6.131.451	5.330.810	4.727.859
Polen	12.141.078	10.911.726	9.799.576
Batu Putih	7.787.763	7.806.019	7.167.902
Boking	8.235.874	7.480.110	6.410.697
Toianas	8.783.297	9.114.454	8.705.449
Nunkolo	10.604.734	9.114.454	7.872.276
Oenino	7.475.508	7.045.035	6.669.180
Kolbano	13.850.102	13.391.795	11.184.998
Kot'olin	9.901.325	9.098.136	6.991.972
Kualin	11.039.534	10.399.977	8.897.559
Mollo Barat	6.208.200	5.475.480	5.206.610
Kokbaun	4.857.214	4.977.091	4.653.952
Noebana	5.001.939	5.100.459	3.887.912
Santian	4.827.785	4.803.412	4.589.764
Noebeba	7.761.132	7.094.617	6.149.259
Kuatnana	9.739.071	9.055.195	8.107.825
Fautmolo	7.164.724	6.809.627	6.302.089
Fatukopa	6.054.866	6.249.972	5.142.365
Mollo Tengah	6.194.730	5.710.165	5.041.324
Tobu	8.267.832	5.710.165	5.041.324
Nunbena	6.621.550	5.778.639	5.338.674
TOTAL	289.840.128	278.442.345	241.982.768

Sumber : Permendagri, 2020-2022

Tabel diatas menjelaskan bahwa nominal yang diterima oleh desa-desa di kabupaten Timor Tengah Selatan sangat besar. Kecamatan Kota SoE menjadi kecamatan dengan penerima Dana Desa paling sedikit, karena hanya memiliki dua desa dan selebihnya merupakan Kelurahan.

Kecamatan Kota Soe menjadi objek penelitian, dikarenakan terdapat dua desa yaitu desa Kuatae dan Desa Noemeto. Saat ini desa Kuatae sedang dalam masa pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah dan keadaan ini mendukung peneliti untuk melakukan penelitian, sedangkan pada desa Noemeto sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat pada tahun 2017. Dana desa langsung dikirim ke Rekening Desa dan di kelola oleh aparat Desa dan Diawasi oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang mengawasi pengelolaan keuangan Dana Desa di Kecamatan Kota Soe adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Adanya pengawasan secara internal yang dilakukan oleh inspektorat maka dapat

diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui pemeriksaan oleh inspektorat maka pengendalian Internal di desa dapat lebih maksimal sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* (Arthana, 2019).

Peran Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat penting untuk terbebas dari segala bentuk praktek penyimpangan terhadap dana desa. Hal ini dikarenakan terjadi beberapa kasus terkait dana desa yang sangat meresahkan. Seperti yang terjadi pada salah satu desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu Desa Taebone, kecamatan Fatukopa yaitu kasus korupsi dana desa sejak tahun 2017 - 2019. Kerugian yang dialami akibat kasus korupsi dana desa tersebut mencapai Rp722.159.672. Dari kasus tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat penting untuk kesehatan pembangunan di Desa Taebone khususnya dan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada umumnya. (pos-kupang.com)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa Inspektorat juga berperan dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak.

Penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan dalam pengelolaan Keuangan Dana Desa harus dihindari agar masyarakat hidup sejahtera. Setiap tahun alokasi dana desa yang diperoleh Kabupaten Timor Tengah Selatan selalu tidak tetap dalam jumlah yang besar, sehingga dibutuhkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan dikarenakan Dana Desa yang diterima di Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat besar. Sebagaimana yang terdapat dalam PP No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa salah satu dari tugas Inspektorat adalah melakukan pengusutan atas kebenaran Laporan mengenai

adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme dengan cara melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan implementasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada pengelolaan keuangan desa berdasarkan aturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pengawasan yang telah dilakukan oleh inspektorat belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

Peran yang baik dari Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa sangat membantu masyarakat Desa agar keluar dari jeratan kemiskinan dengan tatanan keuangan Desa yang baik sehingga ekonomi masyarakat di Daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) bisa menjadi lebih baik. Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Peran Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Kecamatan Kota SoE”**.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016:9). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini difokuskan

kepada peran Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pengawasan pengelolaan keuangan dana desa yang objek utamanya merupakan peran Inspektorat terhadap pengawasan pengelolaan keuangan dana desa meliputi pengalokasian dana desa, penyaluran dana desa, serta penggunaan dana desa. Pokok-pokok penelitian diantaranya Peran Inspektorat Daerah, Pengawasan dan juga Dana Desa. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Adapun informan penelitian disini adalah Auditor di Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Aparat desa Noemeto dan Kuatae.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Inspektorat

Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka peneliti menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat kurang maksimal. Hal ini dilihat dari minimnya frekuensi pemeriksaan terhadap dana desa, serta kurangnya jumlah personil auditor.

Pemeriksaan dana desa sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hambatan yang dihadapi oleh auditor inspektorat adalah kurangnya anggaran, keterbatasan jumlah auditor juga yang kendala yang dialami ketika di desa adanya dokumen yang tidak lengkap. Untuk itu solusinya yaitu dengan mengoptimalkan waktu pemeriksaan, membuat program kerja yang efektif dan efisien,. Solusi untuk kendala yang terjadi dilapangan adalah dengan memberikan kelonggaran pada obrik untuk melengkapi dokumen jika belum lengkap.

Pengusutan

Pengusutan adalah salah satu kegiatan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka peneliti menyatakan bahwa pengusutan yang dilakukan memang ada dan mengikuti prosedur yang berlaku. Pengusutan dilakukan setelah ada laporan pengaduan dari masyarakat/BPD ataupun permintaan dari Aparat Penegak Hukum. Dalam proses pengusutan juga ditemui hambatan yaitu kurangnya komunikasi dan keterbukaan di pemerintah desa dan juga kurang kooperatif sehingga terkadang sang pelaku kelalaian susah untuk ditemui. Solusi untuk hambatan tersebut yakni melakukan pendekatan ke pemerintah desa sebelum diusut secara hukum. Apabila kasusnya sudah fatal dan pelaku tidak ditemukan maka memanfaatkan media yang ada seperti melalui siaran Radio.

Pengujian

Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mencocokkan atau membandingkan data yang tertulis dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan. Berdasarkan wawancara dengan informan maka peneliti menyatakan bahwa pengujian sudah dilakukan dengan benar dan sesuai, namun ada kendala tentang kurangnya waktu sehingga menjadi tidak maksimal dalam proses pengujian.

Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dalam penelitian ini pengawasan dilakukan setelah adanya pemeriksaan terhadap dana desa. Berdasarkan wawancara dengan informan maka peneliti menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan untuk meminimalkan indikasi penyelewengan serta untuk pembinaan, selanjutnya monitoring dan evaluasi (monev), dimana prosesnya dilakukan oleh inspektorat. Monev dilaksanakan untuk memastikan apakah pihak desa sudah menindaklanjuti hasil temuan dan saran sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP). Didalam kegiatan monev

juga ditemukan kendala yakni kurangnya personil dari Inspektorat dan juga kurangnya koopertaif dari pihak desa. Untuk itu solusinya adalah mendorong perangkat desa yang lain untuk ikut membantu karena ini merupakan tanggungjawab bersama.

Dana Desa

Pengalokasian

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka peneliti menyatakan bahwa dana desa dikucurkan oleh pihak pemerintah pusat terkhususnya untuk pembangunan desa itu sendiri dengan kata lain, Dana desa itu dipakai untuk pembangunan, pemberdayaan, lebih banyak fokusnya untuk pembangunan desa. Adapun besaran dana desa berbeda tiap desa karena karena yang pertama dilihat dari unsur kewilayahan, terus yang kedua dilihat dari unsur kemasyarakatan, yang ketiga itu dilihat dari unsur pembangunan dan yang keempat itu dari administasi atau pendataan dalam hal ini penyerapan di tiap desa.

Penyaluran

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka peneliti menyatakan bahwa penyaluran dimulai dari tahap musyawarah desa hingga pembuatan proposal yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan, tahapan penyalurannya adalah tiga kali yaitu pada bulan Juni sebesar 40%, Agustus 40%, dan November 20%. Sedangkan kendalanya adanya sifat monopoli sehingga proses penyaluran terhambat, kendala yang berikut adalah di rekomendasi yang terkadang susah didapat dihari yang sama. Solusinya adalah tidak adanya tumpang tindih pekerjaan, dalam hal ini tidak menunda pembuatan dokumen penyaluran dana desa.

Penggunaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka peneliti menyatakan bahwa dana desa digunakan dibidang fisik dan bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk pemberdayaan lebih ke masyarakat sedangkan Fisik untuk pembangunan, yang dituang ke dalam APBDes dan dilaksanakan. Dewasa ini pemerintah desa berupaya untuk

mengefektifkan penggunaan dana desa agar tidak ada penyelewengan dari perencanaan yang sudah ditetapkan.

Jika ada penyelewengan maka pihak desa maupun auditor inspektorat mengevaluasi serta memeriksa secara rinci apa saja yang menjadi faktor ketidak efektifan tersebut. Adapun kendala dalam penggunaan yang lebih banyak ke SDM di desa. Perangkatnya juga masih sangat kurang dan juga adanya sifat monopoli terhadap kekuasaan. Solusi yang diambil adalah dengan memberikan bimbingan teknis mengenai dana desa, agar bertujuan dana desa tersebut digunakan dengan efektif sesuai dengan rencana. Tidak semua kegiatan/program dapat dibiayai dengan dana desa karena ada batasan-batasan dalam penggunaan dana desa, seperti jalan didesa yang merupakan jalan kabupaten, alat tulis kantor dan juga gaji perangkat desa serta beberapa pembangunan yang seharusnya ditangani oleh pihak lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan dana desa di kecamatan Kota SoE yang tertuang dalam Program Kerja Pegawai Tahunan (PKPT) lebih berfokus pada Pembinaan untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyelewengan terhadap dana desa. Faktor penghambat Peran Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pengawasan dana desa yaitu jumlah personil auditor, minimnya anggaran dan juga dengan waktu audit itu sendiri (*post audit*) dimana audit baru dilaksanakan setelah program/kegiatan itu selesai terlaksana. Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu dengan mengoptimalkan perencanaan anggaran dan membuat program kerja efektif dan efisien dengan menjangkau desa yang belum pernah disentuh untuk melakukan pemeriksaan,. Selain itu terkait dengan tindak lanjut jika ada indikasi terjadinya penyelewengan terhadap dana desa adalah dengan melakukan pendekatan secara persuasif agar terselesaikan dengan damai sehingga tidak berlanjut ke APH.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya 1 (satu) kecamatan dari 32 kecamatan yang dijadikan sebagai objek pembanding peran inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Perbaikan penelitian ini dapat menggunakan waktu yang lebih panjang. Selain itu penelitian selanjutnya disarankan untuk melanjutkan kajian penelitian tentang pengawasan pengelolaan dana desa dengan menggunakan metode penelitian lain seperti komparatif, contohnya membandingkan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (*siswaskudes*) dan penerapannya yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arthana, I Komang. 2019. Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi dan Akuntabilitas*, Vol 7, No. (1), Hal. 42. ejurnal.undana.ac.id
- Badan Pusat Statistik Tentang peringkat Kemiskinan di Indonesia. (2022). <https://bps.go.id>
- Clarence A Dykstra. (1939). *The Quest for Responsibility*. American Political Science Review 33.
- Endraswara, S. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Gouzali Saydam. (1996). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Hasibuan, S.P dan Malayu, H. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Herlina, D, Nielwaty, E. dan Marlinda, P. (2021). Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. *Jurnal JAPS*, Vol 2, Hal. 135–143.
- Huda, N, Pujirahayu, E. W dan Purwanti, A. (2021). *Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka*

- Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H.,M.S (Cetakan 1). Yogyakarta:Thafa Media.
<https://peraturan.bpk.go.id>
- Moleong, Lexy. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nira, dan Jarnawansvah. (2022). Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa Daerah Kabupaten Sumbawa). *Journal Of Accounting Finance and Auditing*, Vol 4, No 1, Hal 42–55.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentand RJPMN Tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tantang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. (2014). Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Polidu, I., Tumuhulawa, A. Ramadhan, K., Kadir, Y dan Moonti, R. M. (2020). Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 20, No. (2), Hal. 226–245. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Priyatni, dkk. 2020. *Pemanfaatan Nvivo Dalam Penelitian Kualitatif Untuk Kajian Pustaka, Analisis Data dan Triangulasi*. Malang: Pusat Pendidikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Malang.
- Rahmat, Pupu S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*, Vol 5, No 9.
- S. Falah. (2005). *Pengaruh Budaya etis Organisasi dan orientasi Etika Terhadap Sensitivitas Etika*. Universitas Diponegoro Semarang.
- S.Kaihatu, Thomas. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesua. *Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol 8, No.
- Senprianthi, dan Rehajeng, Dian Kartika. (2021) *Analisis Kendala Peran Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat)*.
- Siagian, Sondang P. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Statistika Untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George R. (2005). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tumboimbela, Gilbert Gosal, dan Waworundeng, W. (2016). Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Masa Covid-19 (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Governance*, Vol 2, No 1, Hal. 1–23.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014. Tentang Desa.

Urwick, L. (1956). *Management Span of
Control*. Review : Harvard Bussines.

Usman, H., dan Akbar, P. S. (2022).
*Metodologi Penelitian Sosial (Edisi
Ketiga)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian
Kepustakaan*. Jakarta: Bumi Aksara

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH S.K. LERIK KOTA KUPANG

Yuliana Benedikta Dau
Universitas Nusa Cendana
yulendau26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi lingkungan sebagai pertanggungjawaban sosial di Rumah Sakit Umum S.K Lerik dan mengetahui upaya yang dilakukan rumah sakit untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan operasional rumah sakit dan untuk mengetahui pelaporan biaya-biaya apa saja yang telah dikeluarkan oleh rumah sakit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian adalah staf bagian keuangan, staf bagian sanitasi, pengunjung/pasien serta masyarakat yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Penelitian dilakukan dalam empat tahap yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi untuk biaya pengelolaan limbah dan mengakui biaya lingkungan yang terjadi sebagai biaya operasional, pengakuan tersebut menggunakan metode akrual basis. Rumah sakit dalam mengukur biaya dalam hal pengelolaan limbah adalah berdasarkan harga perolehan pada tahun atau anggaran sebelumnya (Historical Cost). Pelaporan biaya lingkungan secara bersama-sama ke dalam satu laporan keuangan. Biaya dicantumkan ke dalam pos biaya operasional. Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang sudah mengelola limbahnya dengan baik, limbah di rumah sakit terbagi menjadi dua yaitu limbah cair dan limbah padat, limbah cair dikelola dengan mesin IPAL menggunakan sistem BIO FILTER an-aerobic dan limbah padat dikelola dengan mesin insenerator.

Kata Kunci : Akuntansi Lingkungan, Biaya Lingkungan, Limbah, Rumah Sakit, Tanggungjawab Sosial

ABSTRACT

This research aims to determine the application of environmental accounting as social responsibility at the S.K Lerik General Hospital and determine the efforts made by the hospital to reduce the environmental impact caused by hospital operational activities and to find out what costs have been reported by the hospital. . This research uses a qualitative approach, descriptive research type. Research informants were finance staff, sanitation staff, visitors/patients and the community who were determined based on purposive sampling techniques. The research was carried out in four stages, namely: data collection, data reduction, data presentation and conclusions. The results of the research concluded that the S.K Lerik Kupang Regional General Hospital had carried out the accounting treatment stages for waste management costs and recognized environmental costs incurred as operational costs, this recognition used the accrual basis method. Hospitals measure costs in terms of waste management based on the acquisition price in the previous year or budget (Historical Cost). Reporting environmental costs together into one financial report. Costs are included in the operational costs item. The S.K Lerik Kupang Regional General Hospital has managed its waste well, waste in the hospital is divided into two, namely liquid waste and solid waste, liquid waste is managed with an IPAL machine using the an-aerobic BIO FILTER system and solid waste is managed with an incinerator machine.

Keywords : Environmental Accounting, Environmental Costs, Waste, Hospitals, Social Responsibility

PENDAHULUAN

Permasalahan tentang lingkungan saat ini semakin meningkat serta disebut menjadi isu yang penting. Persoalan lingkungan pula erat hubungannya dengan dunia kesehatan sendiri. salah satu aktivitas perusahaan dibidang jasa yaitu rumah sakit, secara tidak langsung membuat limbah yang juga membahayakan bagi lingkungan sekitar, sebab pada aktivitas operasionalnya rumah sakit menghasilkan limbah medis yang tergolong limbah berbahaya serta jika tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, maka bisa menyebabkan tercemarnya lingkungan, hal ini pastinya akan memperoleh permasalahan yang ada, saat jumlah pasien yang ada di rumah sakit mengalami peningkatan maka otomatis jumlah limbah medis ikut semakin tinggi.

Pengolahan limbah medis belum maksimal pada sejumlah rumah sakit (RS) di Kota Kupang. Salah satunya rumah Sakit S.K Lerik dimana limbah sampah infeksius yang dihasilkan kurang lebih per hari 50-60 kilogram. Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik merupakan salah satu Unit Organisasi Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Kota Kupang. Adapun jenis pelayanan di rumah sakit terdiri dari UGD, rawat jalan, dan rawat inap. Rumah Sakit S.K. Lerik merupakan salah satu instansi yang dalam melakukan kegiatan operasinya menghasilkan berbagai limbah berupa limbah cair maupun limbah padat. Limbah-limbah ini sangat perlu dikelola secara baik dan benar, untuk itu Rumah Sakit S.K. Lerik harus terjaga lingkungannya dan bebas dari limbah berbahaya.

Fenomena masa pandemi membuat rumah sakit sangat berperan penting sebagai garda terdepan untuk menangani pasien terpapar Covid-19. Dampak dari pandemi ini, rumah sakit keterbatasan kesediaan tempat tidur dan alat medis. Selain itu rumah sakit sebagai penghasil limbah dengan kategori limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) ini mengalami lonjakan selama masa pandemi. Data Kementerian PPN/Bapenas menyebutkan bahwa potensi peningkatan timbunan limbah medis akibat penggunaan alat pelindung diri (APD) mencapai 3-4 kali dari jumlah sebelumnya. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak Maret 2020 hingga Agustus 2021 angkanya telah mencapai 20.110,585 ton per

kubik. Satu tantangan akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan adalah menumpuknya limbah medis yang masuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3). Dampak buruk terhadap lingkungan semakin meningkat karena adanya peningkatan limbah medis secara signifikan. Limbah rumah sakit merupakan limbah berasal dari kegiatan pelayanan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya seperti kantor dan dapur.

Saat ini rumah sakit mulai sadar, akan dampak negatif yang disebabkan dari kegiatan operasional yang sudah dilakukan, hal ini didukung pula menggunakan regulasi dari pemerintah seperti Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yaitu upaya sistematis terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hayati serta mencegah terjadinya pencemaran serta/atau kerusakan lingkungan hidup yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakkan hukum.

Pengelolaan lingkungan perlu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab rumah Sakit terhadap lingkungan sekitar. Pada akuntansi lingkungan lebih cenderung menyoroti persoalan-persoalan yang ada yang berasal dari aspek sosial atau akibat dari aktivitas secara teknis, contohnya pada saat penggunaan alat atau bahan baku yang kemudian akan membentuk limbah produksi yang berbahaya. Perhitungan biaya pada penanganan limbah tersebut diperlukan adanya perlakuan akuntansi yang tersistematis sebab sangat penting pada kaitannya sebagai sebuah control tanggungjawab perusahaan atas lingkungannya. Akuntansi lingkungan adalah bidang ilmu akuntansi yang berfungsi buat mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menilai, menyajikan, serta mengungkapkan akuntansi lingkungan, dalam hal ini pencemaran serta limbah produksi rumah sakit adalah salah satu model dampak negatif dari aktivitas operasional yang membutuhkan sistem akuntansi lingkungan sebagai pengendali terhadap pertanggungjawaban instansi.

Di Indonesia penanganan limbah Rumah Sakit sendiri harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemenkes RI No. 1204/MENKES/SK/X/2004 yang mengatur tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan

Rumah Sakit. Dalam menangani limbah Rumah Sakit tersebut tentulah akan menimbulkan sejumlah biaya yang perlu dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit. Oleh sebab itu perlu adanya perencanaan anggaran yang baik, untuk membiayai pengelolaan limbah tersebut.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Sebagai Pertanggungjawaban Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kota Kupang”.

KAJIAN TEORI

Legitimacy Theory

Legitimacy Theory adalah sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Konsep legitimasi organisasi didefinisikan oleh Dowling dan Pfeffer sebagai kondisi atau status yang terjadi ketika sistem suatu entitas yang digunakan sesuai dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih luas, entitas adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan –batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dalam memperhatikan lingkungan, sehingga dalam teori ini menjelaskan bahwa semua kegiatan operasional perusahaan haruslah berpihak dan sejalan dengan kepentingan masyarakat. Meskipun tujuan utama mencari keuntungan namun perusahaan tidak bisa terlepas dari lingkungan masyarakat. Semakin banyak bentuk tanggung jawab yang dilakukan perusahaan-perusahaan terhadap lingkungannya, citra dan reputasi perusahaan akan semakin baik.

Pengertian Lingkungan

Lingkungan Menurut International Standard Organization (ISO) 14001 adalah keadaan sekeliling dimana organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan interaksinya. Lingkungan di Indonesia sering disebut lingkungan hidup.

Akuntansi Lingkungan

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi (IAI, paragraf 12, 2009).

Tujuan Penerapan Akuntansi Lingkungan

Tujuan dan maksud dikembangkannya akuntansi lingkungan menurut Ikhsan Arfan yaitu :

1. Akuntansi lingkungan merupakan alat manajemen lingkungan. Akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan.
2. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat, sebagai alat komunikasi publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. Tanggapan dan pandangan masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk mengubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan.

Penerapan Akuntansi Lingkungan

Pengelompokkan dalam tahap analisis lingkungan sebagaimana yang ditentukan dalam Standar Akuntansi Keuangan, yaitu :

1. Identifikasi

Pertama kali perusahaan menentukan biaya untuk pengelolaan biaya penanggulangan *externality* yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional usahanya adalah dengan mengidentifikasi dampak negatif dari peristiwa-peristiwa ekonomi tersebut, misalnya rumah sakit yang dalam menjalankan kegiatan

pelayanan pasien menghasilkan berbagai jenis limbah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan sehingga memerlukan penanganan khusus.

2. Pengakuan

Setelah dilakukan pengidentifikasian dampak negatif peristiwa ekonomi tersebut, kemudian unsur tersebut diakui sebagai akun atau rekening biaya pada saat penerimaan manfaat dan sejumlah nilai yang telah dikeluarkan.

3. Pengukuran

Menurut Suwardjono pengukuran (measurement) adalah penentuan angka atau satuan pengukur terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu dari objek tersebut. Pada umumnya, perusahaan mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengelolaan lingkungan dengan menggunakan satuan moneter yang sudah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil perusahaan setiap periode.

4. Penyajian

Penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat laporan keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif, standar akuntansi biasanya memuat ketentuan tentang apakah suatu informasi objek harus disajikan secara terpisah dari laporan utama, apakah suatu informasi harus disajikan digabung dengan akun laporan keuangan yang lain, apakah suatu pos perlu dirinci, atau apakah suatu informasi cukup disajikan dalam bentuk catatan kaki (Suwardjono dalam Mulyani, 2013:18).

5. Pengungkapan

“Pengungkapan (disclosure) memiliki arti tidak menutupi atau menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada

pihak yang memerlukan. Jadi, data tersebut harus bermanfaat, karena apabila data tersebut tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tidak akan tercapai” (Ikhsan, 2008:131).

Biaya Lingkungan

“Biaya lingkungan dapat disebut biaya kualitas (environmental quality costs). Biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan dan pencegahan degradasi lingkungan” (Hansen dan Mowen, 2009:413). Ikhsan (2008:35) menyatakan bahwa “Biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik.

Limbah

Limbah adalah sesuatu yang tidak dipakai, tidak digunakan, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Adanya berbagai sarana pelayanan kesehatan baik rumah sakit, klinik, maupun puskesmas, akan menghasilkan limbah baik cair maupun padat. Limbah pada rumah sakit/puskesmas lebih dikenal dengan pengertian sampah rumah sakit. Limbah padat (sampah) adalah sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia, dan umumnya bersifat padat (Depertemen Kesehatan,2004).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:8), mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif masalah yang dibawah oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis. Masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, dan akan berkembang atau berganti

setelah peneliti berada di lapangan (Sugiyono 2018:52).

Ruang Lingkup Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan kualitatif. Jenis data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan sedangkan jenis data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan/angka. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan biaya lingkungan pengelolaan limbah medis tahun 2022, sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran mengenai objek penelitian dan pengamatan secara langsung.

Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:104), sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data primer dalam penelitian ini yaitu pengamatan secara langsung dan wawancara mendalam sedangkan data sekunder yaitu laporan biaya lingkungan, visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kota Kupang, dan struktur organisasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kota Kupang, Jalan Timor Raya Pasir No.134, Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu penelitian sejak bulan Juni 2023 sampai selesai .

Fokus Penelitian

1. Berfokus pada akuntansi lingkungan meliputi proses pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan di Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kota Kupang.
2. Berfokus terhadap aktivitas-aktivitas pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik yang meliputi aktivitas

penanganan pengelolaan limbah medis, limbah padat dan penanganan limbah cair.

Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data disebut dengan informan, dimana penentuannya tidak diambil secara random, tetapi diambil menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan tertentu. Pertimbangannya adalah orang yang menguasai informasi dari objek yang teliti. Jumlah sampel dan siapa yang akan digunakan sebagai sampel informan, akan berkembang selama di lapangan, dan pengambilan sampel akan dihentikan kalau datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2018:24).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terkait dengan aktivitas-aktivitas pengelolaan limbah.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kota Kupang, terkait dengan aktivitas pengelolaan limbah dan proses pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan akuntansi lingkungan pada Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kota Kupang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti, catatan atau dokumen yang terkait dengan aktivitas penanganan limbah dan biaya lingkungan pengelolaan limbah.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, Menurut Milles And Huberman dalam (Sugiyono, 2014: 246) dalam melakukan analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu

pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification), (Sugiyono, 2018:134).

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian mengumpulkan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

2. Data Reduction (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum hal-hal pokok dan penting. Serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data yang dicari.

3. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Conclusion Drawing/Verification

Langkah keempat dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang di peroleh, baik dari data primer maupun data sekunder dengan menganalisis pola

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Biaya Lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang.

Mengidentifikasi peristiwa-peristiwa ekonomi akan melibatkan Pemilihan aktivitas-aktivitas ekonomi yang relevan bagi suatu organisasi tertentu. Pengidentifikasi biaya dilakukan berdasarkan pada biaya yang timbul atau dibayarkan selama pengolahan limbah padat dan cair terjadi. Pengidentifikasi merupakan tahap awal dari tahapan siklus akuntansi, dengan melakukan identifikasi terhadap transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu

perusahaan dalam periode tertentu, bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit yaitu biaya pengadaan kotak sampah, kantong, dan safety box medis, biaya pemeliharaan IPAL, biaya pemeliharaan Incenerator, biaya Pest Control, biaya penyehatan ruang dan bangunan, biaya jasa kebersihan, biaya pembakaran sampah medis pihak III, biaya pemeriksaan kualitas air bersih, limbah dan makanan, biaya penyimpanan abu Incenerator (drum). Rumah Sakit telah mengidentifikasi biaya yang timbul selama pengelolaan limbah.

Pengakuan Biaya Lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang

Elemen yang telah diidentifikasi akan diakui sebagai rekening dan disebut sebagai biaya pada saat menerima manfaat dari jumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut. Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang mengakui elemen tersebut sebagai biaya apabila tersebut sudah dikeluarkan sebagai biaya apabila biaya tersebut sudah dikeluarkan untuk operasional perusahaan dalam mengelola lingkungannya. Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang dalam pengelolaan biaya lingkungan memiliki anggaran biaya lingkungan yang telah di anggarkan. Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:

“ Untuk unit sanitasi dalam hal ini biaya lingkungan untuk pengelolaan limbahnya sudah ada anggaran tahunannya ”

Untuk agenda-agenda yang telah berjalan setiap bulannya di rumah sakit telah dianggarkan, seperti biaya pengelolaan lingkungan lainnya. Besarnya jumlah biaya ditentukan berdasarkan rincian biaya yang ada atau kesepakatan yang ada dalam hal ini sesuai yang dikatakan oleh Ibu Irene Nahak selaku bagian keuangan dan perlengkapan Rumah Sakit:

“ Dalam menentukan besarnya jumlah biaya yang akan dianggarkan dan yang dikeluarkan rumah sakit mengambil dari data yang ada, untuk pengeluaran biaya limbahnya itu menyesuaikan harga saat beli sesuai yang dikeluarkan dan ada juga yang dilihat dari realisasi anggaran sebelumnya untuk biaya-biaya tertentu, semua tergantung karena terkadang ada barang yang setiap tahunnya harganya naik. ”

Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang akan langsung mencatat dan mengakui sebagai biaya apabila biaya tersebut telah dikeluarkan atau terjadinya kas keluar dan disertai manfaat yang diterima. Biaya dicatat berdasarkan nota atau bukti yang ada. Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang sudah melakukan anggaran tahunan dan mengikuti sesuai rincian harga. Dan biaya akan diakui setelah kas keluar yang disertai dengan manfaat yang diterima.

Pengukuran Biaya Lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang

Perusahaan pada umumnya mengukur jumlah dan nilai atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan tersebut dalam satuan moneter yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil perusahaan setiap periode. Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang menyebutkan dalam melakukan pengukuran menggunakan satuan moneter sebesar kos yang di keluarkan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:

“ biaya pemeliharaan lingkungan dan sanitasi diukur menggunakan satuan mata uang rupiah. Yang jumlahnya sesuai dengan yang telah dikeluarkan dalam melaporkan biaya dengan mengacu pada hasil realisasi anggaran sebelumnya ”.

Hal ini sesuai yang telah di utarakan oleh informen berikutnya :

“ Biaya dalam sanitasi lingkungan termasuk biaya limbah diukur jumlahnya sesuai dengan yang telah dikeluarkan, berdasarkan rincian harga dan sebagian telah ada yang ditetapkan dan kesepakatan yang ada”.

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) Paragraf 99 tahun 2015, pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan. Diketahui bahwa pengukuran yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang telah mengikuti pengukuram sesuai dengan

KDPPLK paragraf 100. Pengukuran yang menggunakan dengan biaya historis.

Penyajian Biaya Lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang

Penyajian berkaitan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:

“Pihak rumah sakit belum menyajikan biaya lingkungan secara terpisah, biaya-biayanya disajikan dalam bentuk laporan operasional rumah sakit”.

Hal ini sesuai yang telah di utarakan oleh informen berikutnya :

“ biaya lingkungannya belum disajikan terpisah, jadi untuk biaya lingkungannya dianggarkan terlebih dahulu namanya RKT (Rencana Kerja Tahunan) dibagian perencanaan dianggarkan. dimulai dari sanitasi, sanitasi mengusulkan kemudian di RKT (Rencana Kerja Tahunan) oleh perencanaan setelah itu dianggarkan dibagian anggaran selesai di anggarkan di bagian anggaran kemudian akan dilakukan atau dilaksanakanlah sesuai dengan yang direncanakan maka keluarlah biaya. biayanya itu berproses sampai akhirnya dilaporkan di laporan keuangan di dalam laporan operasional Rumah sakit ”.

Biaya-biaya yang timbul dalam sanitasi lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang disajikan masih menyatu dengan laporan keuangan perusahaan/rumah sakit yang disajikan ke dalam pos biaya operasional. Dapat diketahui bahwa standar akuntansi keuangan mengharuskan bagi perusahaan yang bergerak dibidang industri yang berpotensi menghasilkan limbah untuk mengungkapkan aktivitas lingkungan sebagai laporan tambahan untuk melengkapi laporan keuangan yang utama yang telah diwajibkan. Penyajian laporan keuangan dapat dilakukan dengan nama rekening yang berbeda-beda sebab tidak ada ketentuan yang baku untuk nama rekening untuk memuat alokasi pembiayaan lingkungan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan.

Pengungkapan Biaya Lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang

Pengungkapan merupakan tahap terakhir dari proses perlakuan akuntansi. Bentuk pengungkapan merupakan transparansi suatu entitas kepada publik selain itu mengungkapkan memberikan informasi yang bermanfaat yang tidak dapat dijelaskan oleh data keuangan. Terkait dengan biaya lingkungan yang dilakukan oleh rumah sakit, memang belum ada standar khusus mengatur tentang pengungkapannya namun akan lebih baik jika rumah sakit mengungkapkannya. Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:

“Untuk pengungkapan kebijakan akuntansi disini diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan setiap akun yang ada di laporan keuangan semua dijelaskan dan dijabarkan disitu. Tetapi, untuk yang terkait dengan biaya-biaya lingkungan belum ada penjelasan atau pengungkapan secara khusus biaya lingkungan dalam CALK karna sudah dikelompokkan dengan biaya lain dimana disini biaya operasional”.

Hal ini sesuai yang telah di utarakan oleh informen berikutnya :

“Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang dalam hal pengungkapan, sudah mengungkapkan atas laporan keuangan, namun pengungkapannya belum di sajikan secara khusus”.

Hal ini menjadi sulit bagi pengguna laporan untuk menelusuri biaya lingkungan yang dilakukan rumah sakit. Namun hal itu tidak melanggar Standar Akuntansi Pemerintahan yang ada, dikarenakan akuntansi lingkungan hanya bersifat sukarela.

Jenis Limbah

Aktivitas rumah sakit menimbulkan berbagai buangan dan sebagian dari itu merupakan limbah berbahaya. Dimana limbah tersebut membutuhkan penanganan khusus sebelum membuangnya. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang terdiri dari 2 bentuk yaitu limbah medis dan limbah non medis . Berikut hasil kutipan dari salah satu informan:

“Jenis limbah yang dihasilkan rumah sakit itu ada (2) Limbah medis dan limbah non medis atau sampah infeksius atau non-infeksius, untuk limbah non-infeksius itu yang seperti limbah rumah tangga kayak plastik, kertas begitu atau seperti sisa-sisa makanan pengunjung seperti itu. Terus kalau untuk limbah infeksius itu ada (2) jenis lagi yaitu infeksius padat dan infeksius cair, ada juga jenis limbah yang lain seperti obat-obatan yang kadaluwarsa tapi itu infeksius tapi dia masuk pada sampah B3”

1. Limbah cair rumah sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang berasal dari semua air buangan termasuk tinja, limbah cair domestik yakni buangan kamar dari rumah sakit yang mungkin mengandung mikro organisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif serta darah yang berbahaya bagi kesehatan. Jenis limbah cair rumah sakit yaitu pelayanan mandi, cuci, kakus pasien berupa limbah cair dalam kamar dan pencucian peralatan yang digunakan, limbah pengobatan atau perawatan klinis terutama berasal dari kegiatan persalinan dan pencucian peralatan dan limbah dari ruangan operasi.
2. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam limbah farmasi, limbah sitotoksi, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Prosedurnya yaitu mengumpulkan sampah dari kamar-kamar pasien, koridor dan nurse station menggunakan troli khusus yang tertutup.

Limbah medis dipisahkan dengan limbah non medis karena, penanganannya juga berbeda. Limbah medis dan non medis dipisahkan tempatnya, dimana ada tempat pembuangan sementara yang khusus untuk limbah medis dan non medis dan di setiap sampah diberikan label untuk masing-masing limbah baik limbah medis maupun limbah non medis.

Pemisahan dapat dilakukan dengan memisahkan beberapa komponen dari sampah atau limbah yang sesuai dengan karakteristik yang dikehendaki, bahan-bahan yang terpakai dan tidak terpakai akan dipisahkan sehingga efektivitas dan efisiensi pengelolaan dapat di tingkatkan. Pemisahan limbah juga dilakukan antara limbah yang dapat di dimanfaatkan dan limbah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali serta sampah basah dan sampah kering. Namun ada juga limbah non

medis dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit yang berasal dari dapur, perkantoran, taman, halaman, dan yang tidak berkaitan dengan kegiatan medis. Pengelolaan makanan dari dapur utama dan instalasi gizi dirumah sakit paling banyak menghasilkan limbah. Aktifitas di kantor menghasilkan limbah kertas dan taman menghasilkan limbah daun dan semua jenis sampah kering yang dihasilkan taman dan halaman.

Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Limbah rumah sakit dihasilkan dari berbagai aktivitas rumah sakit baik medis maupun non medis. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang yaitu berupa limbah cair dan limbah padat. Limbah yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang meliputi limbah yang berasal dari: dapur, ruang perawatan/poliklinik, WC atau kamar mandi, unit atau instalasi lain sesuai dengan kelas rumah sakit. Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:

“Kalau pengolahan limbah padat kita memakai alat yang namanya incinerator, jadi incinerator sampah limbah medis padat ini kita pilih, jadi ada limbah padat infeksius yang kita bisa jadikan sampah non-infeksius seperti botol infus, botol infus itu nanti bagian jarumnya di potong yang telah tersentuh dengan darah manusia, dipotong dan kita buang safety box, tapi botolnya itu kita pisahkan kemudian kita disinfeksi, itu fungsinya kita mengurangi jumlah timbunan infeksius padat di rumah sakit agar tidak terlalu banyak dan pembakarannya menggunakan incinerator. Untuk limbah cair sendiri kita pengolahannya menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)”

1. Proses Pengolahan air limbah Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang dengan biofilter anaerob-aerob. Air limbah dialirkan melalui saringan fiber (bar screen) untuk menyaring limbah yang masih berbentuk padat. Setelah melalui screen air limbah dialirkan ke bak pengendap awal, untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir dan kotoran lainnya. Selain sebagai bak pengendapan, juga berfungsi sebagai bak pengontrol aliran, serta bak pengurai senyawa organik yang berbentuk padatan, sludge

digestion (pengurai lumpur) dan penampung lumpur. Penguraian zat-zat organik yang ada dalam air limbah dilakukan oleh bakteri anaerob atau fakultatif aerob. Setelah beberapa hari operasi, pada permukaan media filter akan tumbuh lapisan film mikro-organisme. Mikro-organisme inilah yang akan menguraikan zat organik yang belum sempat terurai pada bak pengendap. Air limpasan dari bak kontaktor (biofilter) anaerob dialirkan ke bak kontaktor (biofilter) aerob. Di dalam bak kontaktor aerob ini diisi dengan media honeycomb, sambil diaerasi atau dihembus dengan udara sehingga mikro organisme yang ada akan menguraikan zat organik yang ada dalam air limbah serta tumbuh dan menempel pada permukaan media. Dari bak aerasi, air dialirkan ke bak pengendap akhir. Setelah itu ada proses kolam percobaan. Semua jenis limbah padat medis di kumpulkan terlebih dahulu dalam satu wadah. Di setiap ruangan yang menghasilkan limbah disediakan sebuah wadah yang sudah diberi label untuk limbah medis agar tidak tercampur dengan jenis limbah lainnya.

2. Pengolahan limbah padat medis Rumah sakit Umum Daerah S.K Lerik dikelola menggunakan mesin incinerator dan telah memiliki izin penggunaan incinerator. Incinerator adalah suatu alat yang dipergunakan untuk proses pengurangan atau perubahan bentuk sampah yang sudah terbakar menjadi abu pada suhu yang tinggi. Incinerator merupakan suatu alat berupa tungku pembakaran yang bersuhu tinggi ($\Rightarrow 1000^{\circ}\text{C}$), yang digunakan untuk memusnahkan sampah infeksius, ataupun sampah bahan berbahaya dan beracun. Penguraian sampah medis ini harus dilakukan secara rutin agar tidak terjadi jumlah timbunan infeksius padat di rumah sakit yang terlalu banyak. Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:

“Penguraian atau pengolahan sampah medis ini Setiap hari, kita lakukannya setiap hari, kalau padat inikan dia bisa maksimal 2x24 jam atau setiap hari dan tidak lebih dari 2x24 jam, kalau limbah cair setiap hari”

Incinerasi adalah sebuah proses pembakaran yang memungkinkan materi yang mudah terbakar seperti hanya limbah organik mengalami pembakaran, hasil pembakaran berupa residu materi yang sulit terbakar dan abu serta gas

atau partikulat. Residu serta abu yang dihasilkan dikeluarkan dari incinerator dan ditimbun dilahan yang rendah, sedangkan gas atau partikulat dikeluarkan melalui cerobong setelah sarana pengolah pencemar udara yang sesuai. Hasil pengurangan volume dan massa juga mengurangi sifat berbahaya dari limbah tersebut manakala limbah tersebut adalah limbah yang berbahaya dan beracun, dan kemudian yang sangat memegang peranan penting dalam hal ini adalah temperatur dan waktu tinggal yang sesuai selama waktu pembakaran limbah berbahaya tersebut.

Teknologi incenerasi merupakan salah satu cara pengolahan yang baik bagi materi yang mudah terbakar yang mempunyai nilai kalori yang memadai. Limbah berbahaya yang patogenik, seperti dari rumah sakit terutama untuk limbah medis yang berkategori infeksius, sangat baik ditangani cara ini. Mikroorganisme patogen dalam limbah infeksius dapat dimusnahkan disebuah incinerator yang baik karena adanya panas yang tinggi. Waktu tinggal limbah serta temperatur operasi merupakan parameter penentu dalam keberhasilan proses incenerasi limbah medis.

Tanggungjawab Sosial pada Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik

Berdasarkan keterangan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari pengunjung, pasien maupun warga yang tinggal di lingkungan sekitar, dapat di simpulkan bahwa pihak Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang sudah mengelolah limbahnya dengan baik sehingga yang awalnya limbah tersebut berbahaya di kelola menjadi limbah yang aman bagi lingkungan di sekitarnya, dan tidak ada ditemukannya sampah atau limbah yang dibuang disekitar lingkungan, semua sampah maupun limbah sudah sesuai prosedur dan sudah melakukan penanganan sesuai prosedur. Menurut Permenkes, 1204/Menkes/PerXI/2004 yang mengatur tentang persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat ataupun dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Untuk menghindari resiko dang gangguan kesehatan maka perlu penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit. Terkait tanggung jawab yang dibebankan kepada rumah sakit atas timbulnya permasalahan lingkungan seperti

kegiatan pengolahan limbah akibat kegiatan operasionalnya, tentunya rumah sakit harus mengeluarkan biaya lingkungan terkait pengolahan limbah.

Tanggung jawab sosial yang di maksud pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme bagi suatu organisasi untuk mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya, terlebih jika organisasi tersebut berpotensi menghasilkan limbah. Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kupang termasuk salah satunya, dimana rumah sakit adalah suatu organisasi yang kegiatan operasionalnya berpotensi menghasilkan limbah terlebih limbah tersebut adalah limbah yang berbahaya, tentunya jika limbah tersebut di buang begitu saja tanpa di kelola maka akan dapat membahayakan lingkungan di sekitar terlebih makhluk hidupnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan akuntansi biaya lingkungan dan bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan di rumah sakit umum daerah s.k lerik kupang, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Rumah sakit umum daerah s.k lerik kupang telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi untuk biaya pengelolaan limbah. Biaya yang timbul terkait pengelolaan limbah rumah sakit umum daerah s.k lerik kupang terdiri biaya pengadaan kotak sampah, kantong, dan safety box medis, biaya pemeliharaan ipal, biaya pemeliharaan incenarator, biaya pepst control, biaya penyehatan ruang dan bangunan, biaya jasa kebersihan, biaya pembakaran sampah medis pihak iii, biaya pemeriksaan kualitas air bersih, limbah dan makanan, biaya penyimpanan abu incenarator (drum). Rumah sakit umum daerah s.k lerik kupang telah mengidentifikasi biaya yang timbul selama pengelolaan limbah dan mengakui biaya lingkungan yang terjadi sebagai biaya operasional, pengakuan tersebut menggunakan metode akrual basis. Rumah sakit dalam mengukur biaya dalam hal pengelolaan limbah adalah berdasarkan harga perolehan pada tahun atau anggaran sebelumnya (historical cost). Rumah sakit umum daerah s.k lerik kupang menyajikan biaya lingkungan secara bersama-sama ke dalam satu laporan keuangan, biaya

disajikan ke dalam pos biaya operasional. Pengungkapan rumah sakit umum daerah s.k lerik kupang dalam hal pengungkapan, rumah sakit umum daerah s.k lerik kupang sudah mengungkapkan atas laporan keuangan mereka, namun pengungkapannya belum di sajikan secara khusus. Namun hal itu tidak melanggar standar akuntansi pemerintahan yang ada, dikarenakan akuntansi lingkungan hanya bersifat sukarela.

2. Rumah sakit umum daerah s.k lerik kupang sudah mengelola limbahnya dengan baik, limbah dirumah sakit terbagi menjadi dua yaitu limbah cair dan limbah padat, limbah cair dikelola dengan mesin ipal menggunakan sistem bio filter an-aerobic dan limbah padat dikelola dengan mesin insenerator.

Berdasarkan kajian sebelumnya yang telah dibuat menjadi kesimpulan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak rumah sakit menyusun laporan biaya lingkungan atau laporan terkait pengolahan limbah secara khusus dari laporan keuangan secara umum untuk memberikan informasi bagi pengendalian kualitas lingkungan sebagai bentuk usaha peningkatan kualitas lingkungan dan tanggungjawab terhadap lingkungan di sekitar rumah sakit
2. Diharapkan pihak rumah sakit dapat menyusun laporan biaya lingkungan seperti halnya diklasifikasikan dalam teori hansen dan mowen yang meliputi biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal agar dapat mengetahui dari keempat jenis biaya tersebut manakah yang paling banyak mengeluarkan biaya sehingga meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut tentang biaya pengelolaan limbah di beberapa perusahaan/ instansi lainnya yang dimana kegiatan operasional menghasilkan limbah dan dapat menemukan standar pengalokasian biaya lingkungan secara khusus sehingga bisa diperbandingkan dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan hasil yang

didapat dari peneliti dapat lebih secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator RI. 2021.
Https://Indonesia.Go.Id/Kategori/Indonesia-Dalam-Angka/2533/Membenahi-Tata-Kelola-Sampah-Nasional.
Retrieved April 1,2023
- Ariani, Meiliyah, Zulhawati Zulhawati, and Dimas Darmawan. 2022. "Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Pengelolaan Limbah Rumah Sakit." *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia-BPK RI. 2020
Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/171062/Perwali-Kota-Kupang-No-89-Tahun-2020. Retrieved April 1,2023
- Departemen Kesehatan RI, 2004. *Kemenkes RI No.1204/Menkes/SK/X/2004. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persyaratan Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, <https://kemkes.go.id>, Retrieved March 3, 2023
- Departemen Kesehatan RI, 2006. *Kepmenkes RI No.1428/Menkes/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, <https://kemkes.go.id>, Retrieved March 3, 2023
- Hansen, Don R., and Maryanne M. Mowen. 2009. *Managerial Accounting, 8th Edition*.
- Hasiara, La Ode, Rahmawati Fitriana, and Bella Cholifani Dyah Harso. 2018. "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Medika Citra Dalam Proses Pengelolaan Limbah." *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (Jamdi)*
- Ikshan, Arfan. (2009). *Akuntansi Manajemen Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- inews.id. 2022.
Https://Regional.Inews.Id/Berita/Pengolahan-Limbah-Medis-Sejumlah-Rs-Di-Kupang-Belum-Maksimal. Retrieved

- April 1, 2023
Kota Kupang, RSUD S.K LERIK.
<https://www.rsudsklerik.com/>.
Retrieved April 1,2023
- Kusuma, Angga, Rina Asmeri, and Nova Begawati. 2019. "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Dan Tanggung Jawab Soisal Pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi."
- Masruhainah, M. 2017. "Analisis Akuntansi Biaya Lingkungan Dalam Proses Pengolahan Limbah Pada Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri." *FEB UIN Maulana Malik Ibrahim*.
- Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan, and Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia-BPK RI. (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/171062/perwali-kota-kupang-no-89-tahun-2020>).
- Nuwa, Yohanes Calvin, Minarni Anaci Dethan, and Herly M. Oematan. 2023. "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Atas Pengelolaan Limbah Pada Dinas Kesehatan Kota Kupang." *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 11(1):9–21. doi: 10.35508/jak.v11i1.10074.
- Ratulangi, V. J. Aldy, Pangemanan, Sifrid dan Tirayoh, Victorina. 2018. "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Biaya." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*
- Rosary, Ebed de. 2019. "Sampah Medis Di NTT Kian Menggunung. Bagaimana Mengatasinya?"
<https://www.mongabay.co.id/2019/06/26/Sampah-Medis-Di-Ntt-Kian-Menggunung-Bagaimana-Mengatasinya/>. Retrieved March 3, 2023
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Waangsir, Wf, Ferry, and William Lamawuran. 2018. "Studi Pengelolaan Limbah Medis Padat Pada Puskesmas Rawat Inap Di Kota Kupang Tahun 2018." *Prosiding Semnas I Kesehatan Lingkungan & Penyakit Tropis*

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL
DAN MENENGAH SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(STUDI KASUS PADA UMKM UD. SANGGADOLU, KOTA SOE)**

Ana Yowester Maak

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
ester02.kk@gmail.com

Anthon S. Y. Kerih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
kerihianthon@gmail.com

Sarlin P. Nawa Pau

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
sarlin.pau@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pencatatan laporan keuangan UD. Sanggadolu yang masih dilakukan pencatatan keuangan secara sederhana, belum dicatat secara rinci dan belum sesuai dengan standar yang berlaku saat ini, khususnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan UMKM UD. Sanggadolu. Bentuk dari laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yakni laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, jenis penelitian berupa studi kasus. Informan penelitian adalah pemilik UD. Sanggadolu, Bendahara dan salah satu staf UD. Sanggadolu. Penelitian dilakukan melalui empat tahap, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian terkait penyusunan laporan keuangan UD. Sanggadolu berdasarkan SAK EMKM dengan menyesuaikan kondisi transaksi yang ada, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM efektif dan tepat dalam mencapai tujuan pengembangan usaha, salah satunya melalui laporan keuangan. Dengan laporan keuangan yang telah dibuat, pemilik dapat mengembangkan dan memperluas usahanya lebih dari kondisi saat ini.

Kata kunci : *Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan, SAK EMKM, UMKM.*

ABSTRACT

The problem raised in this study is the recording of financial statements UD. Sanggadolu who is still doing the financial recording simply, not recorded in detail and not in accordance with current standards, in particular the Financial Accounting Standards of Micro and Medium Enterprises (SAK EMKM). The purpose of this research is to know the application of SAK EMKM as the basis of the preparation of the financial report of UMKM UD. Sanggadolu. The form of financial report based on SAKEMKM is the profit loss report, financial position report and records on financial reports. This research uses qualitative descriptive research methods, a kind of case study. The research informant is the owner of the UD. Sanggadolu, Bendahara and one of the staff of UD. Research is carried out through four stages, namely: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of research related to the preparation of the financial report of UD. Sanggadolu based on EMKM SAK by adjusting the conditions of the existing transactions, the research results show that the elaboration of financial reports based on SAK EMKM is effective and accurate in achieving the objectives of business development, one of them through financial reports. With the financial statements that have been made, the owners can develop and expand their business more than the current conditions.

Keywords: *Notes on Financial Statements, Financial Report, Loss Report, Financial Position Report, EMKM SAK, UMKM*

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia tidak lepas dari aktivitas individu dan organisasi, dan juga terkait dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang mayoritas aktivitas perekonomiannya dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan suatu negara. Dalam Upaya membangun ekonomi kerakyatan, Presiden RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM naik kelas dan modernisasi koperasi. Peran UMKM dalam perkembangan Perekonomian Indonesia sangat penting dengan jumlah UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5% dan Tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Bi.go.id, 2016)

Dibalik kontribusi UMKM yang cukup baik terhadap perokomian Indonesia ternyata sektor ini masih menyimpan segudang persoalan. UMKM masih lemah dalam menjalankan praktek akuntansi keuangan yang baik dan benar, Persoalan inilah yang menjadi salah satu hambatan bagi kemajuan UMKM di Indonesia. Para pelaku UMKM seringkali mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya, hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman teknologi informasi serta kendala dalam menyusun laporan keuangan (Tatik, 2018). Berkaitan dengan hal inilah, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai asosiasi profesi akuntansi yang diakui di Indonesia telah mengembangkan standar akuntansi keuangan yang dapat diterapkan oleh badan usaha. Salah satu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). IAI menerbitkan SAK EMKM yang disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 18 Mei 2016 dan dinyatakan efektif per 1 Januari 2018, namun nyatanya tidak semua pelaku UMKM mengetahuinya (Herwiyanti, 2020).

UD. Sanggadolu didirikan pada tahun 2007, terletak di Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ketika didirikan pada tahun 2007, UD. Sanggadolu hanya fokus pada penjualan sembako, namun seiring dengan perkembangan kegiatannya,

UD. Sanggadolu juga menjual ayam broiler. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, Dimana dilakukan observasi langsung dan wawancara kepada pemilik UD. Sanggadolu, berdasarkan data usaha ini sudah berdiri kurang lebih 16 tahun, namun sampai sekarang usaha ini belum memiliki pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau dalam hal ini masih dilakukan pencatatan secara manual. Pada pencatatan pendapatan dan pengeluaran serta pencatatan biaya lain seperti Listrik, air dan lain-lain kurang diperhatikan atau dalam hal ini tidak dilakukan pencatatan. UD. Sanggadolu mencatat pengeluaran serta pemasukan pada catatan keuangan yang dibuat berdasarkan kreativitas dan pemahaman dari pemilik usaha.

SAK EMKM mewajibkan UMKM memiliki paling sedikit laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Namun permasalahan yang ditemukan dalam UD. Sanggadolu yaitu pihak UD. Sanggadolu masih kesulitan dalam menggunakan SAK dan lebih memilih proses manual, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta latar belakang Pendidikan yang dimiliki oleh pihak UD. Sanggadolu.

Penelitian ini dilakukan untuk membantu UD. Sanggadolu dalam Menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

KAJIAN TEORI

Teori Entitas

Teori Entitas yang dikemukakan oleh Paton (1962) dalam Santoso (2013) menyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai unit atau entitas ekonomi yang otonom, berdiri sendiri dan menempati posisi yang berbeda dari kepemilikan pemilik atau pihak lain yang menambahkan modal. Artinya hubungan antara UMKM dan pemilik dianggap sebagai transaksi antara dua pihak yang terpisah. Konsep ini sangat penting bagi kelangsungan UMKM itu sendiri, pemilik usaha seringkali kebingungan dalam menentukan keuntungan dari usaha yang dijalankan tanpa melakukan analisis keuangan. Lebih parahnya lagi jika tidak ada kejelasan mengenai jumlah uang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha dan kepentingan pribadi pemilik usaha (Sari,

2013). Konsep inilah yang dijadikan dasar dalam pembuatan laporan keuangan untuk UMKM UD. Sanggadolu.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang mencakup kepentingan Masyarakat (Hasanah, SE, M.Ak dkk, 2020). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa “usaha mikro adalah usaha yang dilakukan oleh individu maupun badan perorangan”.

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan menurut (PSAK NO. 1, 2015) yaitu pemaparan perihal keadaan keuangan serta kinerja keuangan perusahaan yang disajikan secara terstruktur. Definisi laporan keuangan lainnya menurut (Kasmir, 2016) laporan keuangan merupakan pelaporan yang menggambarkan situasi financial entitas di masa sekarang ataupun pada periode tertentu.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai asosiasi profesi akuntansi yang diakui di Indonesia telah mengembangkan standar akuntansi keuangan yang dapat diterapkan oleh badan usaha. Salah satu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). IAI menerbitkan SAK EMKM yang disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 18 Mei 2016 dan dinyatakan efektif per 1 Januari 2018. SAK EMKM dirancang sebagai standar akuntansi sederhana diperuntukan bagi UMKM, sehingga UMKM melakukan penyusunan laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan Keputusan, seperti pada SAK ETAP.

Metode Pencatatan Akuntansi

Dalam metode pencatatan transaksi akuntansi dikenal dua metode pencatatan yaitu secara basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*), agar mudah dipahami berikut

definisi dan gambaran dari kedua metode pencatatan tersebut menurut (Rahayu, 2015):

1. Basis kas (*cash basis*)

Basis kas merupakan basis akuntansi yang dimana mengakui pengaruh dari transaksi dan peristiwa lainnya pada saat diterima atau dibayarkannya kas atau setara kas.

2. Basis akrual (*accrual basis*)

Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh dari transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadinya transaksi dan peristiwa tersebut, Dimana tanpa memperhatikan saat kas dan setara kas diterima atau dibayarkan. Jadi, pada sistem ini transaksi diakui pada saat timbul/terjadi tanpa memperhatikan kapan diterima atau dibayarkannya kas dan setara kas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data kuantitatif berupa laporan keuangan UMKM, untuk jenis data kualitatif berupa data Sejarah dan profil UMKM. Sumber data didapat dari narasumber penelitian berdasarkan dari wawancara yang dilakukan terhadap pihak UD. Sanggadolu. Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM UD. Sanggadolu yang berlokasi di Jalan Gunung Mollo, kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini berlangsung dari bulan Oktober 2023 sampai dengan November 2023. Penelitian ini berfokus pada proses akuntansi, mulai dari jenis transaksi yang telah dilakukan dalam hal ini peneliti menggunakan data transaksi selama tiga bulan yakni Juli-September 2023, kemudian cara pemilik melakukan pembukuan, pencatatan jurnal sampai dengan peneliti membuat laporan keuangan untuk UD. Sanggadolu berdasarkan SAK EMKM dapat di terapkan atau tidak. Dimana bentuk dari laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yakni laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

UD. Sanggadolu merupakan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan. Usaha ini berdiri dari tahun 2007, dengan pemilik atas nama Benyamin Foeh, sebelum menjadi usaha sebesar ini, pemilik Bersama sang istri hanya berjualan di pasar Inpre Kota Soe namun seiring dengan modal yang sudah cukup maka pemilik mulai melakukan perdagangan ayam Boiler. Usaha ini berlokasi di Jalan Gunung Mollo, Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Laporan Keuangan milik UD. Sanggadolu

Laporan keuangan UD. Sanggadolu harus menggambarkan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan usaha dengan baik dan benar dan sesuai dengan SAK EMKM. Selama ini pihak UD. Sanggadolu belum memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM yang pada dasarnya mewajibkan UMKM untuk menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap pihak UD. Sanggadolu menunjukkan bahwa pihak UD. Sanggadolu belum mempunyai laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM dan hanya melakukan pembukuan manual dan sederhana untuk semua transaksi atau peristiwa yang terjadi. Selain itu juga didapati bahwa pihak UD. Sanggadolu tidak mengetahui apa itu SAK EMKM, hal ini di dasari oleh keterbatasan pengetahuan dari pihak UD. Sanggadolu. Adapun pihak UD. Sanggadolu tidak melakukan pemisahan antara harta pribadi dan harta usaha.

Berikut pencatatan sederhana yang dilakukan oleh pihak UD. Sanggadolu untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2.

Gambar 4.1
Transaksi harian UD. Sanggadolu

TR 01/07/23			
TARIK BAHAN			
WILKIN	30	x	70
PIPI	10	x	67
AM POKI	40	x	57
DAI BAKI	125	x	65
TR 01/07/23 TARIK BAHAN 400 dolar			
PE	10	x	70
BO BO	10	x	70
SAI BAKI	15	x	70
KIPAN	70	x	70
SAI BAKI	15	x	70
BO	7	x	70

Sumber: UD. Sanggadolu (2023)

Analisi Pencatatan Laporan Keuangan UD. Sanggadolu

Pengakuan dan Pengukuran aset dan liabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pencatatan yang dilakukan UD. Sanggadolu masih menggunakan metode pencatatan cash basis yang transaksinya dicatat dan diakui pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan juga bahwa UD. Sanggadolu belum melakukan pengukuran unsur laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Didapati bahwa pihak UD. Sanggadolu tidak mengerti apa itu pengukuran unsur laporan keuangan dan menurut pihak UD. Sanggadolu, pengukuran yang mereka lakukan hanyalah mengukur untung atau rugi sehari-hari dari usaha yang mereka jalankan. Hal ini didasari oleh keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh pihak UD. Sanggadolu yang tidak paham mengenai pengakuan unsur laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Pengakuan dan pengukuran aset tetap

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa UD. sanggadolu belum mengakui akun aset tetap di dalam pencatatannya serta tidak melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki. Aset tetap perlu disusutkan agar perhitungan harga pokok penjualan menjadi tepat dan laba yang dilaporkan tidak terlalu tinggi dari yang seharusnya.

Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Dan Beban

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pendapatan UD. Sanggadolu berupa pendapatan atas penjualan ayam potong. Oleh karena itu, pendapatan diakui pada saat pembelian. Misalnya tanggal 14/07/2023 UD. Sanggadolu melakukan penjualan ayam potong dengan total sebesar Rp47.173.000. UD. Sanggadolu mengakui pendapatan sebesar yang diterimanya.

Pengakuan dan pengukuran beban

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa UD. Sanggadolu belum mengakui adanya beban di dalam pencatatannya, beban di dalam pencatatan UD. Sanggadolu diakui sebagai pengeluaran dan tidak diakui sebagai beban. Hal ini didasari oleh kurangnya pemahaman akuntansi dari pihak UD. Sanggadolu.

Pengakuan beban diperlukan agar UD. Sanggadolu mengetahui laba yang tidak terlalu tinggi dari yang seharusnya atau laba bersih usaha.

Penyajian

UD. Sanggadolu didalam menyajikan laporan keuangan belum sesuai dengan SAK EMKM, selama ini pihak UD. Sanggadolu hanya membuat pencatatan sederhana mengenai transaksi dan peristiwa yang terjadi, hal ini didasari oleh keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh Pihak UD. Sanggadolu.

Pencatatan laporan keuangan UD. Sanggadolu berdasarkan SAK EMKM

Jadi dalam penelitian ini, peneliti merekomendasikan model atau rancangan laporan keuangan untuk UD. Sanggadolu berdasarkan SAK EMKM. Dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM adapun Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

Mengenal karakteristik dari UMKM:

1. Ada struktur modal, khususnya modal ekuitas.
2. UD. Sanggadolu sudah mempunyai NPWP dan sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembuatan laporan keuangan untuk UD. Sanggadolu

Pembuatan laporan keuangan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik UD. Sanggadolu dan mengacu pada SAK EMKM, berikut format atau rancangan yang dibuat:

1. Menentukan periode pelaporan.

Periode pelaporan akuntansi yang digunakan adalah periode triwulan, dimulai dengan transaksi yang terjadi sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023.

2. Membuat Neraca awal.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak UD. Sanggadolu maka peneliti

telah Menyusun daftar kode rekening dan nama rekening yang termuat dalam lampiran 3.

3. Pencatatan ke dalam jurnal.

Dari data transaksi yang telah diperoleh dari pihak UD. Sanggadolu maka peneliti melakukan pengimputan transaksi ke dalam jurnal penerimaan dan jurnal pengeluaran, lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11 dan 12.

4. Memposting ke buku besar.

Setelah menyelesaikan pencatatan ke dalam jurnal, selanjutnya peneliti membagi data berdasarkan nama akun, yaitu memposting ke bukubesar yang telah dikompilikasi. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13.

5. Pembuatan neraca saldo sebelum penyesuaian.

Langkah untuk mengetahui saldo buku besar setiap akun sebelum membuat jurnal penyesuaian, lebih lengkapnya pada lampiran 14.

6. Jurnal penyesuaian.

Menganalisis sata penyesuaian selanjutnya mebuat jurnal penyesuaian untuk akun-akun yang memerlukan penyesuaian pada periode berjalan, untuk lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 16.

7. Membuat neraca lajur.

Neraca lajur digunakan untuk merangkum data yang diperlukan untuk Menyusun laporan keuangan. Kertas kerja ini berfungsi sebagai alat untuk menyederhanakan proses pelaporan keuangan manual serta membantu menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat membuat jurnal penyesuaian, untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 17.

Penyajian Laporan Keuangan

Tahapan ini merupakan tahapan Dimana pencatatan harus melaporkan hasil dari laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan SAK EMKM yakni laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan dalam satu periode pelaporan. Berikut laporan keuangan yang dibuat untuk UD. Sanggadolu sebagai berikut:

1. Laporan Laba/Rugi

Laporan laba/rugi merupakan laporan keuangan usaha yang disusun selama satu periode akuntansi yang menggambarkan unsur dari pendapatan dan beban dalam menghasilkan

laba/rugi bersih. UD. Sanggadolu secara kasar menghitung keuntungan dengan memperkirakan keuntungan sebesar 8% dari total penjualan. Berikut laporan laba rugi untuk UD. Sanggadolu:

Tabel 4.7 Laporan Laba Rugi
UD. Sanggadolu
Bulan Juli-September 2023

PENDAPATAN	
Penjualan	Rp2.046.322.000
Total Penjualan	Rp2.046.322.000
HARGA POKOK PENJUALAN	
Persediaan	-
Pembelian	Rp1.721.155.650
Sisa di awal	Rp1.721.155.650
Persediaan akhir	-
HPP	Rp1.721.155.650
LABA KOTOR	Rp325.166.350
BEBAN USAHA	
Beban Gaji	Rp27.000.000
Beban Listrik	Rp750.000
Beban Air	Rp600.000
Beban Bahan Bakar	Rp27.200.000
Beban Depresiasi Bangunan	Rp16.875.000
Beban Depresiasi Kendaraan	Rp23.812.500
Beban konsumsi	Rp3.400.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Rp1.200.000
Total Beban Usaha	Rp100.837.500
Laba/Rugi sebelum pajak penghasilan	Rp224.328.850
Beban Pajak Penghasilan (0,5%)	Rp1.216.443
Laba/Rugi setelah pajak penghasilan	Rp213.112.408

Manfaat penyusunan laporan laba rugi bagi suatu entitas, yakni merupakan titik pangkal penafsiran keberhasilan perusahaan pada periode berikutnya dan dari segi kegunaannya laporan laba rugi dapat digunakan untuk menilai tingkat kemampuan usaha dalam menghasilkan laba.

2. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan yaitu jumlah aset, liabilitas dan ekuitas pada suatu periode pelaporan akuntansi. Berikut laporan posisi keuangan yang dibuat untuk UD. Sanggadolu:

Tabel 4.8 Laporan Posisi Keuangan
UD. Sanggadolu
Bulan Juli-September 2023

ASET	
Aset lancar	
Kas	Rp340.016.350
Total aset lancar	Rp340.016.350
Aset tetap	
Tanah	Rp75.000.000
Bangunan	Rp450.000.000
Akumulasi penyusutan bangunan	(Rp191.250.000)
Kendaraan	Rp254.000.000
Akumulasi penyusutan kendaraan	(Rp142.562.500)
Total aset tetap	Rp445.187.500
Total aset	Rp785.203.850
LIABILITAS DAN EKUITAS	
Liabilitas (kewajiban)	
Hutang dagang	-
Total liabilitas	-
Ekuitas	
Modal pemilik	Rp560.875.000
Laba Usaha	Rp224.328.850
Total ekuitas	Rp785.203.850
Total liabilitas dan ekuitas	Rp785.203.850

Sumber: Data diolah, 2023

Manfaat dari penyusunan laporan posisi keuangan yaitu dapat digunakan untuk menganalisa likuiditas yakni menunjukkan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam melunasi segala kewajiban jangka pendeknya dengan kondisi harta likuid yang dimiliki. Selain itu dapat juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis solvabilitas yaitu menunjukkan kemampuan dari perusahaan untuk segera melunasi hutang yang dimiliki.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang terakhir menurut SAK EMKM adalah Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). CALK merupakan suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM (SAK EMKM 6.1, 2018). Berikut urutan penyajian catatan atas laporan keuangan (CALK) berdasarkan (ED SAK EMKM 6.2, 2018) adalah:

1. UMKM harus menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM.
2. Ikhtisar metode akuntansi, prinsip dasar, aturan serta praktik tertentu yang diterapkan oleh UMKM dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
3. Informasi tambahan dan detail dari akun-akun menjelaskan transaksi secara detail dan penting bagi pengguna untuk lebih memahami laporan keuangan.

Berikut CaLK yang disusun untuk UD. Sanggadolu:

UD. Sanggadolu
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang berakhir September 2023

1. Umum

UD. Sanggadolu berdiri tahun 2007, pemilik UD. Sanggadolu adalah Bpk. Benyamin, usaha ini berlokasi di jalan Gunung Mollo, Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Kebijakan Akuntansi

- a. Pernyataan kepatuhan, laporan keuangan ini disusun dengan menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- b. Dasar penyusunan laporan keuangan menggunakan konsep harga perolehan dan disusun berdasarkan basis akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk Menyusun laporan keuangan adalah Rupiah.
- c. Piutang usaha tidak ada karena semua transaksi yang dilakukan secara tunai.
- d. Persediaan tidak ada karena semua ayam dihitung habis terjual.
- e. Asset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Asset tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa mengurangi nilai sisa.
- f. Pengakuan dari pendapatan dan beban pada saat resiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pelanggan sedangkan beban diakui pada saat terjadinya.

3. Kas dan Setara Kas

Uang tunai yang dimiliki UD. Sanggadolu per 30 September 2023 sebesar Rp 340.016.350.

4. Laba

Laba merupakan akumulasi dari selisih antara pendapatan dan beban. Total keuntungan atau laba per 30 September 2023 sebesar Rp 224.328.850.

5. Pendapatan

Pendapatan UD. Sanggadolu sebesar Rp 2.046.322.000.

6. Beban

Beban yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha sebesar Rp 100. 837.500.

Pembahasan Hasil

Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, diperoleh laporan keuangan UD. Sanggadolu belum disusun sesuai dengan SAK EMKM. Pihak UD. Sanggadolu belum mengetahui bentuk dari laporan keuangan yang sesuai dengan standar, hal ini didasari oleh keterbatasan pengetahuan dari pihak UD. Sanggadolu.

Bentuk laporan yang dibuat oleh pemilik UD. Sanggadolu contohnya adalah laporan pendapatan dan pengeluaran. Sehingga pemilik UD. Sanggadolu akan kebingungan dalam proses pengambilan keputusan yang tepat karena UD. Sanggadolu tidak mengetahui kondisi keuangannya. UD. Sanggadolu mencatat hanya berdasarkan pemahaman dan kebutuhan kegiatan yang dilakukan. Pencatatan sederhana yang dibuat berdasarkan dari bukti transaksi. Pencatatan yang disajikan terbatas pada pendapatan dan pengeluaran. yang dilakukan oleh UD. Sanggadolu tidak sesuai dengan SAK EMKM akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan SAK EMKM tidak ada dalam pencatatan yang dilakukan oleh UD. Sanggadolu.

Pengakuan dan pengukuran pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, UMKM dapat menyajikan aset lancar dan aset jangka Panjang serta liabilitas jangka pendek dan jangka Panjang secara terpisah dalam laporan posisi keuangan dan diukur berdasarkan biaya perolehan. Namun UD. Sanggadolu tidak mencatat aset dan liabilitas keuangan dalam catatan yang dibuatnya. Aset tetap dimiliki oleh UD. Sanggadolu tidak tercatat dalam laporan pembukaan yang telah disiapkan. Nilai aktiva tetap hanya diperkirakan saja tanpa memperhitungkan biaya penyusutan setiap aktiva tetap yang dimiliki. Dalam hal ini pencatatannya dilakukan oleh UD. Sanggadolu dinilai sebesar nilai historis pada saat penyelesaian transaksi. Jadi kita bisa melihat bahwa UD. Sanggadolu tidak menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM.

Laporan kegiatan usaha disampaikan oleh UD. Sanggadolu hanya berupa catatan penjualan/pendapatan dan pengeluaran terkini.

Laporan penjualan/impur memuat jumlah ayam yang terjual, pembeli dan harga jualnya. Demikian pula laporan biaya hanya mencatat jumlah ayam yang dibeli dan laporan tersebut disampaikan oleh UD. Sanggadolu dalam melakukan pengawasan atau pengendalian pengelolaan usaha hanya sebatas hubungan usaha yang terjalin atas dasar pengetahuan pribadi, sehingga memudahkan Anda mengetahui perkembangan usaha yang dikelola. UD. Sanggadolu hanya menyajikan laporan keuangan secara manual berupa nama pembeli, jumlah ayam yang terjual dan harga per ekor.

UD. Sanggadolu tidak menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM, karena arus kas masuk dan keluar memungkinkan untuk mengetahui apakah aktivitas yang dilakukan menghasilkan laba atau rugi. Menurut pemberi informasi pada penelitian ini, cara menentukan untung dan rugi dalam suatu bisnis cukup sederhana, yaitu jika pendapatan penjualan lebih besar dari biaya maka dikatakan untung, begitu pula sebaliknya jika biaya lebih besar dari pendapatan operasi bisnis maka dikatakan rugi. Namun yang menjadi masalah adalah ketika pemilik UD. Sanggadolu menggunakan dagangannya untuk keperluan pribadi. UD. Sanggadolu tetap mencatat dan mengurangi stock ayam tanpa menerima pembayaran. Selain itu sering kali pembayaran uang dari konsumen digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dampak dari hal ini adalah pemilik tidak pernah mengetahui keuntungan sesungguhnya yang didapatkan.

Hasil penelitian menunjukkan UD. Sanggadolu tidak menerapkan konsep entitas di mana entitas harus memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan hasil usaha entitas, karena seharusnya terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi dengan usaha yang dijalani. Mengetahui untung dan rugi suatu perusahaan sangatlah penting, untuk mengetahui keadaan perusahaan saat ini. Apakah Anda untung atau sebaliknya, jatuh dan merugi? Dan salah satu cara untuk mengetahui berapa keuntungan atau kerugian yang diperoleh suatu perusahaan adalah dengan melihat laporan laba ruginya.

Persepsi pihak UD. Sanggadolu yang terpenting mereka untung/rugi dalam usaha yang dijalankan. Konsep laba rugi yang dipahami oleh pemilik usaha tidak sesuai dengan SAK EMKM. Di mana menurut SAK EMKM, laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun pendapatan, beban bunga dan beban pajak. Hal ini menyebabkan

besar perhitungan atau persepsi keuntungan/kerugian yang dialami UD. Sanggadolu kurang tepat.

Dalam penelitian ini peneliti menyusun laporan keuangan untuk UD. Sanggadolu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah, Langkah yang dilakukan mulai dari pengakuan, pengukuran, kemudian melakukan penyajian laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yang disusun untuk UD. Sanggadolu dengan menyesuaikan dengan kondisi UMKM. Dengan laporan keuangan yang dibuat dapat menjadi titik awal yang baik karena dalam kurun waktu tertentu pemilik dapat mengetahui lebih jauh pengeluaran dan pendapatan yang diterima. Bukan hanya laporan arus kas saja yang dibutuhkan UD. Sanggadolu tetapi juga beberapa laporan lain yang mempunyai fungsi berbeda, seperti laporan laba rugi untuk melihat apakah ada laba dan neraca untuk melihat perubahan aktiva tetap dan lancar, liabilitas jangka pendek dan jangka Panjang, serta ekuitas pada tanggal tertentu. Menurut Karyawati (2012: 11), akuntan yang baik harus mampu menyusun laporan keuangan yang menyajikan informasi yang diperlukan. Dengan pelaporan keuangan yang sesuai standar, UD. Sanggadolu dapat tumbuh dan mengembangkan usahanya lebih dari keadaan saat ini, walaupun pendapatan yang diterima belum tentu meningkat, pemilik dapat lebih mengetahui posisi usahanya, pencapaian tujuan Tujuan keuangan Anda pada periode berikutnya akan lebih mudah dan dapat tercapai. dasar dasar penilaian kegiatan usaha pada periode berikutnya agar usaha lebih nyaman dan lancar.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nuvitasari, dkk (2019), menyatakan bahwa penerapan SAK EMKM dimaksudkan agar UMKM mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk menyajikan dan Menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Selanjutnya penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purba (2019), Dimana hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam membuat laporan keuangan setiap usaha memiliki kreatifitasnya sendiri-sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UD. Sanggadolu belum mengimplementasikan SAK EMKM pada laporan keuangannya sehingga laporan yang dimiliki oleh UD. Sanggadolu belum efektif. Selama ini pencatatan yang dilakukan UD. Sanggadolu yaitu pembukuan sederhana terkait pengeluaran dan pemasukan perhari dari kegiatan usahanya. Serta UD. Sanggadolu tidak memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan di dalam pembukuan sederhana milik UD. Sanggadolu belum memenuhi kriteria kebijakan akuntansi yang ditentukan oleh SAK EMKM. Ketidakmampuan UD. Sanggadolu di dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM didasari oleh keterbatasan pengetahuan ilmu akuntansi yang dimiliki oleh pihak UD. Sanggadolu.
2. Penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM adalah efektif dan tepat, karena dengan laporan keuangan yang sesuai standar, pemilik dapat tumbuh dan mengembangkan kegiatan usahanya melampaui keadaan saat ini, walaupun pendapatan yang diterima belum tentu meningkat, Pemilik mungkin mempunyai gambaran yang lebih baik tentang hal ini. Dengan adanya laporan keuangan dapat memudahkan pencapaian tujuan keuangan pada periode berikutnya dan dapat memberikan dasar dasar untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha pada periode berikutnya agar menjalankan usaha menjadi lebih mudah dan lancar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi objek penelitian
 - a. Disarankan UD. Sanggadolu dapat menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan agar

dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

- b. Disarankan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan UD. Sanggadolu harus disesuaikan dengan kriteria kebijakan akuntansi yang ditentukan oleh SAK EMKM.
 - c. Disarankan UD. Sanggadolu untuk menggunakan jasa akuntan agar UD. Sanggadolu dapat memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.
2. Bagi penelitian selanjutnya
Disarankan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian agar dapat lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data agar penelitian dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminatul Mutiah, R. (2019). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Neraca Berbasis SAK-ETAP Pada UMKM. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 194–203. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.142>
- Arip, H., Karim, N. K., & Kartikasari, N. (2023). Penerapan Sak Emkm Pada Umkm Di Kecamatan Pringgabaya. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 135–144. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i1.417>
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2018). Determinant factors influencing the accountability of village financial management. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(1).
- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. CV. ANDI OFFSET.
- Bi.go.id. (2016). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)*. Departemen Pengembangan UMKM (DPUM). <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Pages/Profil-Bisnis-UMKM.aspx>
- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, T. D. W. (2020). *Intermediate Accounting IFRS Edition*. In John Wiley & Sons, Inc. 5(3).

- Hasanah, SE, M.Ak, N., Muhtar, M.Si, D. S., & Muliastari, SE, M.Ak, I. (2020). *MUDAH MEMAHAMI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)*. Uwais Inspirasi Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=AjQhEAAAQBAJ&lpg=PA1&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. *SAK EMKM Ikatan Akuntan Indonesia*, 4, 1–54.
- Limanseto, H. (2022). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>
- Nuvitasari, A., Citra Y, N., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 341. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21144>
- Omega, T. N. (2014). *IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA UMKM BERDASARKAN SAK EMKM (STUDY KASUS PADA PENGRAJIN TAS IBU INDRA SURIYANTI)*. 173, 2014.
- Tatik. (2018). Implementasi SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah) Pada Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM XYZ Yogyakarta). *Relasi : Jurnal Ekonomi*, 14(2), 1–14. <https://doi.org/10.31967/relasi.v14i2.260>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1*.
- Utari, R., Harahap, I., & Syahbudi, M. (2022). Penerapan SAK EMKM Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 491–498. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1449>